

# **ANALISIS KEWENANGAN ATRIBUTIF CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN BONTONOMPO KABUPATEN GOWA**

## **SKRIPSI**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Untuk mencapai derajat Sarjana S-1**

**Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**Oleh  
Riski Wahyuni.R  
E12113508**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2017**

**ANALISIS KEWENANGAN ATRIBUTIF CAMAT DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN  
BONTONOMPO KABUPATEN GOWA**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Untuk mencapai derajat Sarjana S-1**

**Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**Oleh  
Riski Wahyuni.R  
E12113508**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2017  
LEMBARAN PENGESAHAN  
SKRIPSI**

## LEMBARAN PENGESAHAN

## SKRIPSI

ANALISIS KEWENANGAN ATRIBUTIF CAMAT DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN  
BONTONOMPO KABUPATEN GOWA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

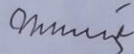
Riski Wahyuni.R

E 12113508

Telah dipertahankan di depan panitia ujian skripsi  
Pada tanggal 18 April 2017 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:

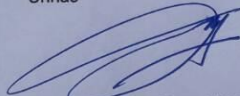
Pembimbing I

Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si  
NIP. 19570707 198403 1 003

Pembimbing II

Rahmatullah, S.Ip, M.Si  
NIP. 19770513 200312 1 002

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik  
dan Ilmu Pemerintahan FISIP Unhas  
UnhasDr. H. A. Samsu Alam, M.Si  
NIP. 19641231 198903 1 027Ketua Program Studi Ilmu  
Pemerintahan FISIPDr. Nurlinah, M.Si  
NIP. 19630912 198702 2 001

ii  
LEMBARAN PENERIMAAN

## SKRIPSI

ANALISIS KEWENANAGAN ATRIBUTIF CAMAT DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN  
BONTONOMPO KABUPATEN GOWA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

RISKI WAHYUNI.R

E12113508

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian  
skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, Pada Hari Selasa, Taggal 9 Mei 2017

Menyetujui :

## PANITIA UJIAN :

Ketua	: Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si	(  )
Sekretaris	: Rahmatullah, S.IP. M.Si	(  )
Anggota	: Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si	(  )
Anggota	: Dr. A. M. Rusli, M.Si	(  )
Anggota	: Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si	(  )
Pembimbing I	: Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si	(  )
Pembimbing II	: Rahmatullah, S.IP. M.Si	(  )

## KATA PENGANTAR

***Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Segala puji dan rasa syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat ALLAH Subhanahu Wata'ala, dzat yang Maha Agung, Maha Pengasih dan Bijaksana atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “ ***Analisis Kewenangan Atributif Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa*** ” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Hasanuddin. Salam dan shalawat tidak lupa penulis kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana segala tindakannya menjadi tauladan untuk kita semua.

Skripsi ini berisi hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan atributif Camat dalam bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Bontonompo kabupaten Gowa beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan, sekiranya ada masukan dan kritikan dari pembaca yang bersifat membangun, maka penulis akan menerimanya dengan senang hati.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukanlah sesuatu yang mudah sebab tidak dapat dipungkiri dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak

kekurangan atau kesalahan yang telah diperbuat, maka dari itu dengan segenap kerendahan hati penulis memohon maaf dan mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Proses penulisan skripsi ini mulai dari proposal, penelitian hingga pengolahan data, melibatkan banyak pihak yang sangat memberi andil besar pada penulis. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, penghargaan ini terkhusus untuk Ibunda Haniah.SH dan ayahanda AKP.Abd Rahman.SH senantiasa memberikan semangat, kasih sayang, cinta, pengorbanan, dan doa tulus yang tak henti-hentinya untuk penulis. Penulis sangat meminta maaf apabila selalu membuat Ibunda dan Ayahanda sedih dan kecewa selama membesarkan penulis semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan yang tiada tara di dunia maupun di akhirat kelak.
2. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. A. Alimuddin Unde, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf.

4. Bapak Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan FISIP Unhas beserta seluruh staf.
5. Ibu Dr. Hj. Nurlinah, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP.
6. Bapak Dr. Rasyid Thaha, M.Si selaku Pembimbing I penulis yang telah rela mengorbankan waktunya untuk membimbing penulis.
7. Bapak Rahmatullah, S.Ip,M.Si selaku Pembimbing II yang telah rela mengorbankan waktunya memberi arahan, saran, dan kritikan terhadap penyusunan skripsi ini serta sebagai Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
8. Kepada para penguji penulis mulai dari Ujian Proposal hingga Ujian Skripsi, terima kasih atas masukan dan arahnya.
9. Para dosen pengajar Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unhas, terima kasih atas didikan dan ilmu yang diberikan selama perkuliahan.
10. Seluruh staf tata usaha pada lingkup Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan beserta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
11. Seluruh informan penulis di Kecamatan Bontonompo, yakni Camat, staf Kecamatan Bontonompo, Kantor Desa Bontolangkasa, Kantor Desa Barembeng, Kantor Lurah Tamallayan, Kantor Lurah Kalaserena, Tokoh Masyarakat, Tokoh agama, Tokoh pemuda,

LSM dan Masyarakat di Kecamatan Bontonompo yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan banyak informasi yang sangat bermanfaat kepada penulis.

12. Kakanda Rismayanti Rahman, Amd.Keb dan Riskayani Rahman, SE yang telah memberikan semangat dan dorongan kepada penulis untuk segera menyelesaikan study, selalu mendengar keluhan kesah penulis serta senantiasa selalu setia mendengarkan dan menjadi teman curhat penulis dan tak lupa untuk Kakak ipar Praka Abd.Kahar dan Yaqub, S.pd yang senantiasa selalu memberikan semangat untuk penulis.
13. Adik-adik tersayang, tercinta Muh.Rajib Rahman dan adik ipar Widya wira pratiwy yang selalu setia dan sabar menemani dan mengantar penulis dalam meneliti, tidak lupa juga Muh. Arief Rahman yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
14. Kepada saudara-saudara dari ibunda dan ayah, Paman dan Bibi terumata untuk "*tante*" Bia yang senantiasa selalu mengurus penulis mulai dari kecil hingga sekarang
15. Kepada sepupu-sepupu dari keluarga ibunda dan ayahanda tanpa terkecuali yang senantiasa selalu mengingat dan mendorong penulis untuk segera menyelesaikan study.
16. Kepada sahabat-sahabat tercinta, Sucitra Saleh, Sulasmini azis, Muqmininah Nurfatima. SE, Irmha Said, dan Masita anggraini yang senantiasa selalu setia dari SMA menemani, mendengarkan



curhatan penulis, mendengarkan keluhan kesah penulis serta memberikan semangat, doa dan motivasi kepada penulis dalam mengerjakan skripsi. Panggilan untuk sahabat-sahabat ini adalah *Para Matu*

17. Kepada sahabat-sahabat penulis yaitu Siti Nurhasanah Furqani S.Ip, Beatrix, Sundari, Salfia, Ipa, Tami, Mega, Dina dan Suci yang selalu setia dan selalu ada setiap penulis butuhkan, yang senantiasa ada menghibur penulis saat penulis merasa sedih, pendengar setia dan tempat curhat ternyaman bagi penulis maaf jika penulis pernah berbuat salah, penulis sangat sayang *Ummalite*.
18. Kepada Teman-teman, Achmad Rizal Sudu, Muhaemin S.Pd, Gian Nastiar, S.Kom, Harifuddin Tahir SH, dan Syam aifin yang senantiasa menjadi sahabat serta memberikan semangat, doa dan motivasi kepada penulis selama menyusun untuk segera menyelesaikan study.
19. Kepada Saudara-saudara tak sekandung penulis, *Lebensraum*, yaitu Alif, Anti, Azura, Dirga, Jusna, Dewi, Suna, Ulfi, Uceng, Karina, Immang, Hanif, Dias, Zul, Yun, Febi, Irez, Yeyen, Erik, Ekki, Lala, Icha, Arya, Ayyun, Afni, Oskar, Kaswandi, Fahril, Ekka, Yani, Fitri, Syarif, Babba, Juwita, Dede, Aqil, Dana, Ade, Adit, Dika, Rian, Uma, Sube, Ugi, Hendra, Fitra, Angga, Mia, Haeril, Edwin, Wulan, Hasyim, Hillary, Mustika, Ike, Ina, Irma, Jay, Maryam, Herul, Aksan, Najib, Reza, Rosandi, Rum, Sani, Uli, Wahid, Wahyu, Wiwi, Wiwin,

Yusra, Amel dan Almh. lis yang telah menemani selama kurang lebih 3 tahun di kampus tercinta Universitas Hasanuddin. Semoga semangat merdeka militan tetap kita jaga. Kenangan bersama kalian mulai dari “*zaman botak lugu*”, “*zaman gondrong*” sampai rapi dan cantik seperti sekarang karena telah menjadi mahasiswa tingkat akhir akan tetap diingatan.

20. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAPEM) FISIP Unhas. Terima kasih atas ilmu, pengalaman, kesempatan berkarya, kebersamaan dan kekeluargaan yang telah diberikan. Jayalah Himapemku, Jayalah Himapem kita.
21. Kepada teman-teman SMAN 09 Makassar yang sampai sekarang masih bersama.
22. Teman-teman KKN Reguler Gelombang 93 Unhas Kabupaten Soppeng Kecamatan Marioriawa, khususnya Posko Desa Laringgi, teman seataap penulis selama kurang lebih 1 bulan menjalani pengabdian kepada masyarakat yaitu Wincu, Ici, Mitha, Mufti, Idil dan Maykel, Ibu Posko Tante Timang, Ambo Muin yang baik, Pak Sabir dan Pak Desa beserta seluruh masyarakat Desa Laringgi.
23. Kepada Teman-teman Akper Bhayangkara yang masih bersama hingga saat ini.
24. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.

Akhir kata, penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima Kasih, *Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar,  
2017.

## DAFTAR ISI

Sampul	I
Lembar Pengesahan	li
Kata Pengantar	lii
Daftar Isi	lx
Daftar Tabel	Xii
Daftar Gambar	Xv
Daftar Lampiran	Xvi
Intisari	xvii
Abstract	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>10</b>
2.1. Landasan Teori	10
2.1.1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah	10
2.1.2. Tugas Pokok Pemerintah	14
2.1.3. Pemberdayaan	17
2.1.4. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	21
2.2. Kerangka Pikir Penelitian	28

BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1. Lokasi Penelitian	32
3.2. Tipe Penelitian	32
3.3. Teknik Pengumpulan Data	33
3.4. Informan Penelitian	34
3.5. Sumber Data	35
3.6. Definisi Konsep	36
3.7. Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Luwu Utara	38
4.1.1. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Luwu Utara	38
4.1.2. Kondisi Geografis Wilayah	41
4.1.3. Penduduk	45
4.1.4. Tenaga Kerja	46
4.1.5. Keadaan Sosial	47
4.1.6. Pengeluaran Penduduk dan Konsumsi Makanan	50
4.1.7. Potensi Sumber Daya Alam dan Hayati	52
4.1.8. Visi dan Misi Kabupaten Luwu Utara	62
4.2. Tata Kelola Kelembagaan di Kabupaten Luwu Utara terkait Pemberdayaan UMKM	67
4.3. Gambaran Umum Kantor Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Luwu Utara	70
4.3.1. Visi dan Misi Dinas Koperasi, Perindustrian dan	

Perdagangan Kabupaten Luwu Utara	70
4.3.2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas	81
4.4. Upaya Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Luwu Utara	93
4.4.1. Upaya Pemerintah Daerah dalam Menumbuhkan Iklim Usaha	101
4.4.2. Upaya Pemerintah Daerah dalam Memperkuat Potensi atau Daya Usaha	124
4.4.3. Upaya Pemerintah Daerah dalam Melindungi Usaha	139
4.5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Luwu Utara	140
4.5.1. Faktor Penghambat Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Luwu Utara	141
4.5.2. Faktor Pendukung Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Luwu Utara	147
BAB V PENUTUP	153
5.1. Kesimpulan	153
5.2. Saran	154
DAFTAR PUSTAKA	156
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah dan Penyerapan Tenaga Kerja UMKM pada Periode 2015 di Kabupaten Luwu Utara	6
Tabel 2.	Hasil Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2015 Kabupaten Luwu Utara	6
Tabel 3.	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara	42
Tabel 4.	Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara	43
Tabel 5.	Rata-rata Suhu Udara dan Kelembaban Relatif Setiap Bulan di Kabupaten Luwu Utara	44
Tabel 6.	Rata-rata Hari Hujan dan Curah Hujan Setiap Bulan di Kabupaten Luwu Utara	45
Tabel 7.	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 dan 2015	46
Tabel 8.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Luwu Utara	47
Tabel 9.	Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok, Umur Sekolah dan Partisipasi Sekolah di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015	49
Tabel 10.	Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten	

Luwu Utara pada Tahun 2010 - 2014	50
Tabel 11. Rata-rata Pengeluaran dan Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015	51
Tabel 12. Rata-rata Pengeluaran dan Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Non Makanan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015	52
Tabel 13. Luas Lahan Sawah (Hektar) Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015	53
Tabel 14. Luas Lahan Tegal/Kebun, Ladang/Huma dan Lahan yang Sementara Tidak Diusahakan Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara (Hektar) Tahun 2015	54
Tabel 15. Produksi Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara (Ton) Tahun 2015	55
Tabel 16. Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Sayuran di Kabupaten Luwu Utara (Ton) Tahun 2015	56
Tabel 17. Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Buah di Kabupaten Luwu Utara (Ton) Tahun 2015	57
Tabel 18. Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Luwu Utara (Ton) Tahun 2015	58



Tabel 19.	Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak (Ekor) di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015	59
Tabel 20.	Populasi Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas (Ekor) di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015	60
Tabel 21.	Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Luwu Utara (Ton) Tahun 2014-2015	61
Tabel 22.	Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya (Ton) di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015	62
Tabel 23.	Jumlah UMKM di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015	97
Tabel 24.	Jumlah UMKM di Kabupaten Luwu Utara Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2015	99
Tabel 25.	Jumlah Tenaga Kerja UMKM di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015	100
Tabel 26.	Jumlah Dana Bergulir Beserta Angsuran yang Diberikan Kepada Pelaku UMKM Tahun 2006, 2009 dan 2010	103
Tabel 27.	Daftar Nama Kelompok Industri Kecil dan Menengah (IKM) Penerima Hibah Barang/Peralatan	127
Tabel 28.	Daftar Kelompok IKM Penerima Bantuan Hibah Kemasan Label Produk Tahun 2014	129
Tabel 29.	Daftar IKM yang Diusulkan Mendapatkan Sertifikat Halal di Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015	130

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.

Gambar 2.

Gambar 3.

Gambar 4.

Gambar 5.

Gambar 6.

Gambar 7.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian

Lampiran 2. Peraturan Perundang-Undangan

Lampiran 3.

Lampiran 4. Contoh Naskah Kesepakatan Bersama

Lampiran 5. Dokumentasi

## INTISARI

**Riski Wahyuni. R**, Nomor Induk Mahasiswa **E12113508**, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin menyusun skripsi dengan judul Analisis Kewenangan Atributif Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, dibawah bimbingan Bapak Dr. Rasyid Thaha, M.Si sebagai Pembimbing I dan Bapak Rahmatullah, S.Ip, M.Si sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan atributif Camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa serta faktor faktor yang mempengaruhinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, pelaksanaan kewenangan atributif Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa dapat dikatakan cukup baik dan berpedoman pada peraturan perundangan nasional. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat indikator yang belum maksimal seperti, mendorong partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang. Kedua, faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan atributif Camat di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa meliputi faktor penghambat dan pendukung. Faktor penghambat yakni keterbatasan anggaran dan kurangnya kemampuan yang dimiliki sumber daya manusia. Adapun faktor yang menjadi pendukung yakni kepemimpinan camat dan kebijakan pemerintah..

## ABSTRACT

**Riski Wahyuni. R, E12113508**, The Study Program of Government Science, Faculty of Social Science and Political Science Hasanuddin University essay with the title of Analysis Attribute Authority of the Subdistrict Head in the Implementation of Government in the Subdistrict Bontonompo of the Regency Gowa, under the guidance of Mr. Dr. Rasyid Thaha, M.Si as the counselor I and Mr. Rahmatullah, S.Ip, M.Si as the counselor II.

This research aims to determine the implementation attribute authority of the Subdistrict Head in the community empowerment activities in the Subdistrict Bontonompo of the Regency Gowa and the factors that influence. To achieve that goal, used method of research qualitative with parse the data is descriptive. The technique collection of the data by observation, interview, as well as document and archives by using technical analysis descriptive qualitative.

The result of the research showed: *First*, implementation attribute authority of the Subdistrict Head in the implementation of government in the Subdistrict Bontonompo of the Regency Gowa can be said good enough and is based on the national legislation. But in the implementation there are indicators are not maximal yet, as like encourage public participation in the Musrembang forum. *Second*, the factor that influence implementation attribute authority of the Subdistrict Head in the Subdistrict Bontonompo of the Regency Gowa include the factor inhibiting and supporters. The factors inhibiting are limitedness budget and the lack of capabilities of human resources. The factors that be supporting are leadership of Subdistrict Head and Government policy.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Pada era otonomi seperti saat ini, dibutuhkan aturan yang dapat dijadikan pedoman dalam menghadapi dinamika pemerintahan. Aturan yang dijadikan pedoman dalam pemerintahan sebelumnya yakni UU Nomor 22 Tahun 1999 kemudian di gantikan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 selanjutnya diganti lagi menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur Otonomi daerah. Hal ini membawa implikasi mendasar dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Salah satu institusi yang mengalami dampak mendasar akibat pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Kecamatan.

Kedudukan kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Pusat dalam menjalankan asas dekonsentrasi berubah menjadi perangkat daerah Kabupaten/Kota yang nasibnya sangat tergantung pada “kebaikan hati” Bupati/Walikota dalam mendelegasikan sebagian kewenangan pemerintahan dalam rangka desentralisasi. Seiring dengan perguliran waktu, nasib organisasi kecamatan juga tidak begitu jelas, dalam arti akan menjadi semakin berperan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ataukah justru mengalami penghapusan.

Dalam gerak pelaksanaannya penyelenggaraan otonomi daerah yang sesuai dengan Undang-undang tersebut dalam substansinya juga mengalami perubahan. Namun pada esensinya tetap menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua unsur pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut mendorong terjadinya perubahan secara struktural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial adalah yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Camat.

Perubahan paradigmatis penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut mengakibatkan pola distribusi kewenangan Camat menjadi sangat tergantung pada pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan umum. Hal ini mempunyai implikasi langsung terhadap optimalisasi peran dan kinerja Camat dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Camat mempunyai kewenangan. Dilihat dari sumbernya, kewenangan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu kewenangan atributif dan kewenangan delegatif. Kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat dan diberikan kepada suatu institusi atau pejabat berdasarkan peraturan Perundang-undangan. Kewenangan delegatif adalah kewenangan yang berasal dari pendelegasian kewenangan dari institusi atau pejabat yang lebih tinggi tingkatannya.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status kecamatan kini merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah bahkan kelurahan, hal ini dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 209, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni, "Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, kecamatan, dan kelurahan".

Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan. Tugas dan fungsi Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam



Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Pada pasal 225 tertuang beberapa tugas pokok dan fungsi Camat. Kemudian secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Tugas dan Kewenangan Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kecamatan Bontonompo merupakan salah satu kecamatan yang telah mengalami pertumbuhan dan kemajuan dalam berbagai bidang bila dibandingkan beberapa kecamatan yang terdapat di kabupaten Gowa. Sebagai kecamatan yang juga berbatasan langsung dengan Kabupaten Takalar, tentunya intensitas pelayanan dan dinamika bermasyarakat akan lebih banyak ditemukan di kecamatan Bontonompo ini. Selain itu, Bontonompo merupakan kecamatan dengan tipe A yang dibentuk untuk kecamatan dengan beban kerja yang besar. Hal ini dapat dilihat berdasarkan Struktur Organisasi Kecamatan Bontonompo yang terdiri dari 1 sekretariat dan paling banyak 5 seksi, sekretariat terdiri dari 3 subbagian. Untuk itu, camat harus mampu melakukan segala tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Salah satu tugas dan fungsi kecamatan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kecamatan yaitu mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kewenangan ini sekaligus menjadi kewenangan Camat yang bersifat atributif. Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat, pemerintah kecamatan dituntut untuk dapat

bekerjasama dengan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar pemberdayaan yang dilakukan pemerintah berjalan sesuai yang diharapkan.

Dari penelitian awal yang penulis dapatkan bahwa kecamatan Bontonompo memiliki kelompok masyarakat yang potensial dalam pembangunan wilayah kecamatan. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan adanya kelompok-kelompok masyarakat tersebut, dapat menjadi instrument pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas. Kelompok-kelompok tersebut yakni kelompok pemuda Karang Taruna dan Remaja Masjid, Kelompok Menjahit untuk para perempuan serta Kelompok Tani. Hal tersebut berpengaruh dalam sinergitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Bontonompo.

Pemerintah setempat juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyumbangkan pemikiran-pemikiran dalam pembangunan daerah setempat. Peningkatan partisipasi kelompok ini juga termaktub sebagai salah satu kewenangan Camat dalam bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, Camat harus mampu melakukan segala tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk itu, kewenangan atributif yang kini dimiliki Camat menarik menjadi suatu fokus masalah penelitian untuk mengetahui seberapa jauh peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, maka

penulis melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Kewenangan Atributif Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa**”. diharapkan memberikan gambaran yang real tentang pelaksanaan kewenangan Camat di era otonomi daerah.

## **1.2. Rumusan Masalah Penelitian**

Berangkat dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, maka masalah penelitiannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan kewenangan atributif Camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa ?
- b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan atributif Camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

- a. Mengetahui dan menggambarkan pelaksanaan kewenangan atributif Camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa;
- b. Mengetahui dan menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan atributif Camat dalam kegiatan

pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Manfaat akademis. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi kontribusi positif terhadap Ilmu Pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan kewenangan Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta dapat menambah dan memperkaya hasanah pemikiran penulis dalam menganalisis masalah-masalah yang terjadi dalam penerapan Ilmu Pemerintahan.
2. Manfaat Praktis. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Gowa secara khusus Kecamatan Bontonompo sebagai bahan pembuatan kebijakan mengenai pelaksanaan kewenangan atributif oleh Camat Bontonompo dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
3. Manfaat metodologis. Diharapkan dapat menjadi masukan atau bahan informasi bagi peneliti selanjutnya ataupun mahasiswa lain yang ingin mendalami studi tentang kewenangan atributif Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

Tinjauan pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan mendengarkan, laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kegiatan ini merupakan bagian yang penting dari pendekatan ilmiah yang harus dilakukan dalam setiap penelitian ilmiah dalam suatu bidang ilmu. Teori yang disajikan pada bagian tinjauan pustaka menerangkan hubungan antara beberapa konsep yang digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian.

##### **2.1.1. Tinjauan tentang Kecamatan dan Camat**

Studi tentang kecamatan di Indonesia telah dilakukan oleh para ahli baik dari dalam maupun luar negeri, meskipun jumlahnya masih relative terbatas. Beberapa studi yang menonjol misalnya oleh D.D.Fagg Tahun 1958 yang mengkaji Camat dengan kantornya. Selain itu terdapat studi lain yang dilakukan oleh Nico Schulte Nordholt yang mengkaji organisasi pemerintah kecamatan dengan menitikberatkan pada hubungan Camat dengan lurah atau kepala desa. Menurut Nordholt (1987:23-24), kajian tentang kecamatan berarti mencakup tiga lingkungan kerja yaitu: a. Kecamatan dalam arti kantor Camat; b. Kecamatan dalam arti wilayah,

dalam arti seorang Camat sebagai kepalanya; c. Camat sebagai bapak “pengetua wilayahnya”.

Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten atau Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang Camat.

Dalam hal ini, menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 209 dijelaskan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten/kota, sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) huruf f, sebagai berikut :

(2) Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. sekretariat daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat;
- d. dinas;
- e. badan; dan
- f. Kecamatan.

Kedudukan Kecamatan dijelaskan pada pasal 221 UU No. 23 Tahun 2014 sebagai berikut :

- (1) Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.
- (3) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/ wali kota disampaikan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan.

Jadi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Selanjutnya Kecamatan dibentuk cukup dengan Peraturan Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Namun Rancangan Perda tentang pembentukan Kecamatan tersebut sebelumnya harus mendapat persetujuan bersama antara Bupati/Walikota disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur untuk mendapat persetujuan.

Di tingkat kecamatan, dipimpin oleh seorang Camat. Hal ini diatur pada Pasal 224 UU No.23 Tahun 2014 sebagai berikut:

- (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
- (2) Bupati/wali kota wajib mengangkat Camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan Camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin, dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

### **2.1.2. Tinjauan tentang Klasifikasi Kecamatan**

Klasifikasi Kecamatan diatur pada Pasal 223 UU No. 23 Th 2014 sebagai berikut :

- (1) Kecamatan diklasifikasikan atas:



- a. Kecamatan tipe A yang dibentuk untuk Kecamatan dengan beban kerja yang besar; dan
- b. Kecamatan tipe B yang dibentuk untuk Kecamatan dengan beban kerja yang kecil.

(2) Penentuan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah Desa/kelurahan.

Perbedaan klasifikasi kecamatan kalau menurut UU No.32 tahun 2004 yang kemudian diatur di dalam PP No 19 Tahun 2008 Struktur Organisasi Kecamatan bisa berpola Maksimal dengan 5 Kepala Seksi dan bisa berpola Minimal dengan 3 Kepala Seksi. Untuk sekarang ini Kecamatan diatur dengan klasifikasi Tipe A (Kecamatan yang beban kerjanya besar) dan klasifikasi Tipe B (Kecamatan dengan beban kerja yang kecil).

### **2.1.3. Tinjauan tentang Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Camat**

Adapun tugas Camat diatur dalam Pasal 225 UU No 23 Tahun 2014 sebagai berikut :

- (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:  
 menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
  - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- f. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- g. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Sedangkan, Dalam menjalankan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
2. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraa ketentraman dan ketertiban umum;

4. Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
5. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan desa atau kelurahan;
9. Pembinaan dan pelaksanaan kesekretariatan Kecamatan;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

### **3) Kewenangan Camat**

Kewenangan camat terdiri atas 2 macam yakni kewenangan atributif dan kewenangan delegatif. Kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat dan diberikan kepada suatu institusi atau pejabat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewenangan delegatif adalah kewenangan yang berasal dari pendelegasian kewenangan dari institusi atau pejabat yang lebih tinggi tingkatannya.

Kewenangan atributif dapat dilihat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
7. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Kewenangan delegatif yang dimaksud yakni penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/wali kota yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2008 yang meliputi

1. Perizinan;
2. Rekomendasi;
3. Koordinasi;
4. Pembinaan;
5. Pengawasan;
6. Fasilitasi;
7. Penetapan;
8. Penyelenggaraan; dan
9. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Selain kewenangan delegatif diatas, Camat juga mendapat pelimpahan wewenang, misalnya kebersihan di Kecamatan, pemadam kebakaran di Kecamatan dan pemberian izin mendirikan bangunan untuk luasan tertentu.

Mengenai pendanaan akibat dari pelimpahan wewenang tersebut diatas diatur pada Pasal 227 UU No. 23 Tahun 2014 yaitu : Pendanaan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan yang dilakukan oleh camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h serta Pasal 226 ayat (1) dibebankan pada APBD kabupaten/kota.

#### **2.1.4. Tinjauan tentang Kewenangan camat dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, dijelaskan kedudukan, Tugas dan

kewenangan camat. Salah satu kewenangan camat adalah mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dijelaskan pada pasal 16 sebagai berikut.

(1) Tugas camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:

- a) mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan
- b) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan dan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan
- c) melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi, sekarang telah banyak diterima, bahkan telah berkembang dalam berbagai literatur di dunia barat.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat “*people-centered*,

*participatory, and sustainable*” (chambers, 1995 dalam Kartasasmita, 1996).

Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakanagan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternative terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain oleh Friedmann (1992) disebut *alternative development*, yang menghendaki “*inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equality*”

Lebih lanjut, Subejo dan Supriyanto (2005) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat seharusnya diletakkan dan diorientasikan serah dan selangkah dengan paradigma baru pendekatan pembangunan. Paradigma pembangunan lama yang bersifat *top-down* perlu direorientasikan menuju pendekatan *bottom-up* yang menempatkan masyarakat atau petani di pedesaan sebagai pusat pembangunan atau oleh chambers dalam anholt (2001) sering dikenal dengan semboyan “*put the farmers first*”.

Wilson (Sumaryadi, 2004) mengemukakan bahwa kegiatan pemberdayaan pada setiap individu dalam suatu organisasi, merupakan suatu siklus kegiatan yang terdiri dari:

**Pertama,** menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki, yang merupakan titik awal perlunya pemberdayaan . tanpa adanya keinginan untuk berubah dan memperbaiki, maka semua upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak akan memperoleh perhatian, simpati, atau partisipasi masyarakat;

**Kedua,** menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan/kenikmatan dan atau hambatan-hambatan yang dirasakan, untuk kemudian mengambil keputusan mengikuti pemberdayaan demi terwujudnya perubahan dan perbaikan yang diharapkan;

**Ketiga,** mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat atau perbaikan keadaan;

**Keempat,** peningkatan peran atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang telah dirasakan manfaat/perbaikannya;

**Kelima,** peningkatan peran dan kesetiaan pada kegiatan pemberdayaan, yang ditunjukkan berkembangnya motivasi-motivasi untuk melakukan perubahan;

**Keenam,** peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan;

**Ketujuh,** peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan baru.



Seperti telah dikemukakan, dalam praktek, kegiatan pemberdayaan seringkali terfokus pada upaya perbaikan pendapatan (*income generating*). Pemahaman seperti itu tidak salah, tetapi belum cukup, sebab hakikat dari pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan, mendorong kemauan dan keberanian, serta memberikan kesempatan bagi upaya-upaya masyarakat (setempat) untuk dengan atau tanpa dukungan pihak luar mengembangkan *kemandiriannya* demi terwujudnya perbaikan kesejahteraan (ekonomi, sosial, fisik dan mental) secara berkelanjutan. Mandiri disini bukan berarti menolak bantuan “pihak luar” tetapi kemampuan dan keberanian untuk mengambil keputusan yang terbaik berdasarkan pertimbangan-pertimbangan;

- a. Keadaan sumberdaya yang dimiliki dan atau dapat dimanfaatkan;
- b. Penguasaan dan kemampuan pengetahuan teknis untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Sikap kewirausahaan dan keterampilan manajerial yang dikuasai;
- d. sosial-budaya dan kearifan tradisional yang diwariskan serta dilestarikan secara turun temurun.

#### **2.1.5. Tinjauan tentang Masyarakat**

Dalam kamus politik disebutkan bahwa masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terkait oleh suatu kehidupan yang mereka anggap sama. Selanjutnya menurut Shadily (1993:47) mengemukakan bahwa :

“masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau karenanya sendiri bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain”.

Dalam konteks pemikiran sistematis, masyarakat dipandang sebagai suatu sistem sosial. Pandangan ini selain merujuk pada suatu masyarakat besar, misalnya masyarakat kecamatan, juga dapat merujuk pada masyarakat yang kecil misalnya keluarga, sekolah, organisasi dan lain-lain. Menurut parson, kehidupan sosial itu harus dipandang sebagai sebuah sistem sosial yang kemudian dapat diartikan bahwa kehidupan itu harus dilihat sebagai suatu keseluruhan atau totalitas dan bagian atau unsur yang saling berhubungan antara satu sama lain terdapat saling ketergantungan dan berada dalam satu kesatuan yang utuh. Kehidupan sosial yang seperti ini yang disebut sistem sosial.

Sebuah sistem sosial dapat juga disebut sebagai sebuah pola interaksi sosial dari komponen-komponen sosial yang teratur terlembagakan. Komponen-komponen sosial itu adalah beberapa peran-peran sosial misalnya peran dalam bidang pemerintahan (Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa, Dosen, Guru dan lain-lain). Komponen-komponen inilah yang kemudian saling berhubungan dimana terdapat saling ketergantungan antara satu dengan yang lain.

Karakteristik lain dari sistem sosial adalah kecenderungan dalam mempertahankan ekulibrium atau keseimbangannya dengan kata lain

diperlukan adanya keteraturan dalam sebuah sistem, jika dalam sebuah sistem terjadi penyimpangan atau ketidakteraturan dari norma, maka sistem tersebut akan berusaha menyesuaikan diri dan mencoba kembali pada keadaan semula. Hal ini dapat ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat, ketika ada sebuah budaya dari luar yang mulai masuk, maka masyarakat akan berusaha resisten terhadap budaya tersebut karena dinilai akan mengancam keseimbangan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.

Memandang masyarakat sebagai sebuah sistem, menurut parsons ada 4 sub-sistem yang menjalankan fungsi-fungsi utama dalam kehidupan bermasyarakat yaitu:

1. Fungsi adaptasi
2. Fungsi pencapaian tujuan
3. Fungsi integrasi
4. Fungsi untuk mempertahankan atau menegakkan pola dan struktur masyarakat.

Fungsi adaptasi akan diperankan oleh sub-sistem ekonomi yang melaksanakan fungsi-fungsi ekonomi, misalnya pelaksanaan produksi dan distribusi barang dan jasa serta akan menghasilkan fasilitas-fasilitas atau alat-alat yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dari sistem itu sendiri.

Fungsi pencapaian tujuan akan diperankan oleh sub-sistem politik yang melaksanakan fungsi distribusi kekuasaan dan monopoli unsur

penggunaan paksaan yang terlegitimasi. Sub-sistem ini juga akan bekerja memaksimalkan potensi masyarakat dalam mencapai tujuan kolektifnya.

Fungsi integritasi diperankan oleh sub-sistem hukum yang melaksanakan fungsi integrasi, misalnya dengan cara mempertahankan tata cara dan keterpaduan antara komponen sistem yang saling berbeda pendapat, pandangan dan kerangka moralitas untuk membentuk solidaritas sosial.

Fungsi mempertahankan dan menegakkan pola dan struktur masyarakat diperankan oleh sub-sistem budaya yang menangani urusan pemeliharaan nilai-nilai dan norma-norma budaya yang berlaku dalam proses kehidupan bermasyarakat.

Masyarakat adalah suatu kesatuan yang selalu berubah yang hidup karena proses perubahan masyarakat yang menyebabkan perubahan tersebut. Kehidupan yang teratur dan aman dalam kehidupan bermasyarakat disebabkan pengorbanan sebagian kemerdekaan anggota-anggotanya, baik dengan paksaan atau dengan sukarela. Pengorbanan dalam hal ini adalah dengan menahan nafsu dan perbuatan sewenang-wenang untuk mengutamakan kepentingan dan keamanan bersama. Paksaan dalam hal ini adalah dengan tunduk kepada hukum dan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat (Negara, perkumpulan dan lain-lain). Sedangkan sukarela berarti menurut adat dan berdasarkan keinsyafan akan persaudaraan dalam kehidupan bersama tersebut.

Setiap tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat menyebabkan hubungan baru yang sifatnya kekal ataupun sementara. Hubungan itu adalah mengikat ataupun menceraikan, masyarakat tersusun dari golongan-golongan atau berbagai organisasi yang oleh manusia yang hidup dalam alam modern harus dialami misalnya kehendak untuk berorganisasi. Selanjutnya jika seseorang keluar dari golongan atau perkumpulan tertentu, maka dilain waktu ia harus memasuki lingkungan atau golongan lain.

Proses masyarakat tersebut terjadi oleh naluri manusia dimana, manusia adalah makhluk sosial dimana jika dua orang atau lebih saling berinteraksi berdasarkan suatu motif atau tujuan dan proses interaksi tersebut terjadi berulang kali menurut pola-pola tertentu maka dengan sendirinya terbentuklah masyarakat.

#### **2.1.6. Tinjauan tentang Partisipasi**

Pengertian yang secara umum dapat ditangkap dari istilah partisipasi adalah, keikut sertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. pengertian ini, nampaknya selaras dengan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa kamus bahasa sosiologi.

Dalam hal ini, menurut Verhangen (1979) menyatakan bahwa, partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan

manfaat. Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut, dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh yang bersangkutan mengenai :

- a) Kondisi yang tidak memuaskan, dan harus diperbaiki;
- b) Kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau masyarakatnya sendiri;
- c) Kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan;
- d) Adanya kepercayaan diri, bahwa ia dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.

Lebih lanjut, analisis tentang “modal sosial” (*social capital*) terhadap arti penting partisipasi masyarakat dalam pembangunan, menunjukkan bahwa (Wolcook dan Narayan, 2000) partisipasi dibutuhkan untuk mengembangkan *sinergi* dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat maupun sinergi dalam “jejaring komunitas” (*community network*).

Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka, artinya, melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparatur)

pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu-hidupnya.

Adapun bentuk-bentuk partisipasi menurut Dusseldrop, (1981) mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa:

- 1) Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat;
- 2) Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok;
- 3) Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain;
- 4) Menggerakkan sumberdaya masyarakat;
- 5) Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan;
- 6) Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.

Dilihat dari tingkatan atau tahapan partisipasi, Wilcox (1988) mengemukakan adanya 5 (lima) tingkatan, yaitu:

- 1) Memberikan informasi (*information*)
- 2) Konsultasi (*consultation*): yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan-balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut;
- 3) Pengambilan keputusan bersama (*deciding together*), dalam hal arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan

serta, mengembangkan peluang yang diperlakukan guna pengambilan keputusan;

- 4) Bertindak bersama (*acting together*), dalam arti tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya;
- 5) Memberikan dukungan (*supporting independent community interest*), dimana kelompok-kelompok local menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

#### **2.1.7. Tinjauan tentang Evaluasi**

Kata “evaluasi”, dalam kehidupan sehari-hari sering diartikan sebagai padanan istilah dari “penilaian”, yaitu suatu tindakan pengambilan keputusan untuk menilai sesuatu obyek, keadaan, peristiwa, atau kegiatan tertentu yang sedang diamati. selain dari itu, adapun menurut Frutchey (1973) mengemukakan bahwa kegiatan evaluasi selalu mencakup kegiatan:

- 1) Observasi (pengamatan);
- 2) Membanding-bandingkan antara hasil pengamatan dengan pedoman yang ada atau telah ditetapkan lebih dahulu;
- 3) Pengambilan keputusan atau penilaian atas obyek yang diamati.

Telaahan mengenai pengertian evaluasi, sebagaimana telah dikemukakan diatas, memberikan arahan bahwa istilah evaluasi merujuk



kepada dua pengertian yakni: pengukuran dan interpretasi yang keduanya sangat diperlukan untuk melakukan penilaian atau pengambilan keputusan (Matthew, 1973). Dengan pengukuran, berarti kita berhadapan dengan kegiatan untuk membandingkan suatu keadaan dengan keadaan lain yang menjadi ukurannya; sedang interpretasi mengharakan hati dan pikiran kita untuk mengartikan data atau fakta yang dihasilkan dari pengukuran tersebut.

Dengan demikian, melalui kegiatan evaluasi, kita akan dapat mengambil kesimpulan tentang segala sesuatu yang telah terjadi, sekaligus memberikan landasan dan arahan bagi kegiatan-kegiatan lanjutan yang perlu dilakukan. Selaras dengan itu Stufflebeam (1971) mengemukakan bahwa, pada dasarnya tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai atau menyimpang dari pedoman yang telah ditetapkan, atau untuk mengetahui tingkat kesenjangan antara keadaan yang telah dicapai dengan keadaan yang dikehendaki atau seharusnya dapat dicapai, sehingga dengan demikian akan dapat diketahui tingkat efektifitas dan efisiensi kegiatan yang telah dilaksanakan; untuk selanjutnya dapat segera diambil langkah-langkah guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan seperti yang dikehendaki.

Di lain pihak, menurut Mardikanto dan Sutarni (1985) mengemukakan 3 (tiga) matra kegunaan evaluasi pemberdayaan yang mencakup:

1. Kegunaan bagi kegiatan pemberdayaan itu sendiri, yakni:
  - 1) Untuk mengetahui seberapa jauh tujuan kegiatan telah dicapai;
  - 2) Untuk mencari bukti, apakah seluruh kegiatan telah dilaksanakan seperti yang direncanakan, dan apakah semua perubahan-perubahan yang terjadi memang sesuai dengan penerima manfaat yang diinginkan;
  - 3) Untuk mengetahui segala masalah yang muncul/ dijumpai, yang berkaitan dengan tujuan yang diinginkan;
  - 4) Untuk mengukur efektifitas dan efisiensi sistem kerja dan metode-metode pemberdayaan yang telah dilaksanakan;
  - 5) Untuk menarik simpati para aparat dan warga masyarakat, bahwa program yang dilaksanakan itu memang memperoleh perhatian yang sungguh-sungguh untuk selanjutnya, dengan adanya simpati mereka itu diharapkan lebih meningkatkan aktivitas dan partisipasi mereka dalam kegiatan pemberdayaan di masa-masa akan datang.
2. Kegunaan bagi aparat pemberdayaan, yang meliputi:
  - 1) Adanya kegiatan evaluasi, fasilitator merasa diperhatikan dan tidak dilupakan, sehingga memberikan kepuasan psikologis yang akan mampu mendorong aktivitas pemberdayaannya di masa mendatang;
  - 2) Melalui evaluasi, seringkali juga digunakan untuk melakukan penilaian terhadap aktivitas atau mutu kegiatan fasilitator itu

sendiri, yang sangat penting artinya karena melalui evaluasi biasanya juga akan menentukan masa depan/ promosi bagi pengembangan karier yang bersangkutan;

- 3) Dengan adanya kegiatan evaluasi, setiap fasilitator akan selalu mawas diri, dan selalu berusaha agar kegiatannya dapat dinilai baik, sehingga akan membiasakan dirinya untuk bekerja tekun dan penuh tanggungjawab.

### 3. Kegunaan bagi pelaksana evaluasi:

- 1) Kebiasaan untuk mengemukakan pendapat berdasarkan data atau fakta dan bukan didasarkan pada asumsi, praduga, atau intuisi semata;
- 2) Kebiasaan bekerja sistematis, sesuai dengan prosedur dan pedoman yang telah ditetapkan;
- 3) Memperoleh peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan dan mengembangkan:
  - (1) Teknik pengukuran yang tepat dan teliti;
  - (2) Teknik pengumpulan data yang andal;
  - (3) Teknik analisis yang tepat dan tajam.

Evaluasi sebagai suatu kegiatan, sebenarnya merupakan proses untuk mengetahui atau memahami dan memberikan penilaian terhadap suatu keadaan tertentu, melalui kegiatan pengumpulan data atau fakta dan membandingkannya dengan ukuran serta cara pengukuran tertentu yang telah ditetapkan.

### **2.1.8. Tinjauan tentang Pembinaan**

Dalam hal suatu pembinaan menunjukkan adanya suatu kemajuan peningkatan, atas berbagai kemungkinan peningkatan, unsur dari pengertian pembinaan ini merupakan suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan pembinaan menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu istilah pembinaan hanya diperankan kepada unsur manusia, oleh karena itu pembinaan haruslah mampu menekan dan dalam hal-hal persoalan manusia.

Hal ini sejalan dengan pendapat Miftah Thoha dalam bukunya yang berjudul “Pembinaan Organisasi” mendefinisikan, pengertian pembinaan bahwa :

1. Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, atau pernyataan menjadi lebih baik.
2. Pembinaan merupakan suatu strategi yang unik dari suatu sistem pembaharuan dan perubahan (change).
3. Pembinaan merupakan suatu pernyataan yang normatif, yakni menjelaskan bagaimana perubahan dan pembaharuan yang berencana serta pelaksanaannya.
4. Pembinaan berusaha untuk mencapai efektivitas, efisiensi dalam suatu perubahan dan pembaharuan yang dilakukan tanpa mengenal berhenti. (Miftah,1997:16-17).

Adapun karakteristik pembinaan, Menurut French dan Bell yang dikutip oleh Miftah Thoha dalam bukunya Pembinaan Organisasi mengidentifikasikan karakteristik pembinaan, yaitu :

1. Lebih memberikan penekanan walaupun tidak eksklusif pada proses organisasi dibandingkan dengan isi yang substantif.
2. Memberikan penekanan pada kerja tim sebagai suatu kunci untuk mempelajari lebih efektif mengenai berbagai perilaku.
3. Memberikan penekanan pada manajemen yang kolaboratif dari budaya kerja tim.
4. Memberikan penekanan pada manajemen yang berbudaya sistem keseluruhan.
5. Mempergunakan model “action research”.
6. Mempergunakan ahli-ahli perilaku sebagai agen pembaharuan atau katalisator.
7. Suatu pemikiran dari usaha-usaha perubahan yang ditujukan bagi proses-proses yang sedang berlangsung.
8. Memberikan penekanan kepada hubungan-hubungan kemanusiaan dan sosial.

Dengan memahami karakteristik diatas, membedakan setiap perubahan, pengembangan atau pembinaan yang dapat dijadikan suatu ukuran yang dapat membedakan antara pembinaan dengan usaha-usaha pembaharuan dan pembinaan lainnya.

Teknik pembinaan merupakan suatu pekerjaan yang sangat kompleks, yang ditujukan untuk melaksanakan setiap kegiatan. Teknik ialah berhubungan dengan cara atau jalan bagaimana suatu kebijakan itu dilakukan. Teknik pembinaan bertujuan untuk mengetahui secara pasti arus daripada informasi yang diperlukan, yang diperoleh dari suatu kegiatan pembinaan yang berwujud data-data, dimana setiap orang terlibat lebih mendetail dan telah dipraktekkan secara luas di dalam kegiatan pembinaan. Teknik-teknik dalam suatu pembinaan yang fokusnya luas dan pada umumnya berjangka panjang, seperti pendapat Mintzberg yang dikutip oleh Alfonsus Sirait dalam bukunya Manajemen menggambarkan empat cara mengenai teknik-teknik dalam suatu pembinaan, yaitu :

1. Teknik Adaptif (teknik yang berliku-liku), Teknik yang sifatnya relatif dan terfragmentasi serta fleksibilitas, yakni suatu teknik yang mampu berjalan berliku-liku dalam menghadapi suatu hambatan.
2. Teknik Perencanaan (planning strategy), Teknik ini memberikan kerangka pedoman dan petunjuk arah yang jelas. Menurut teknik ini perencanaan tingkat puncak mengikuti suatu prosedur sistematis yang mengharuskan menganalisis lingkungan dan lembaga/organisasi, sehingga dapat mengembangkan suatu rencana untuk bergerak ke masa depan.
3. Teknik Sistematis dan Terstruktur, Teknik yang berdasarkan pilihan yang rasional mengenai peluang dan ancaman yang terdapat di

dalam lingkungan dan yang disusun begitu rupa, supaya sesuai dengan misi dan kemampuan lembaga/organisasi.

4. Teknik Inkrementalisme Logis, Merupakan suatu teknik perencanaan yang mempunyai gagasan yang jells mengenai tujuan lembaga/organisasi dan secara informal menggerakkan lembaga/organisasi ke arah yang diinginkan. Dengan teknik ini paling sesuai dengan situasi tertentu untuk mendorong lembaga/organisasi secara tahap demi tahap menuju sasarannya.

#### **2.1.9. Tinjauan tentang pengawasan**

Menurut Goerge R.Terry dalam pengertiannya pengawasan menitik beratkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai,dengan makssud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana.dengan demekian tindakan pengawasan ini tidak dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan, akan tetapi justru pada akhir suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut menghasilkan sesuatu.

#### **2.2. Kerangka konseptual**

Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagai wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah (Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Pasal 224 ). Camat adalah kepala kecamatan. Jabatan camat adalah jabatan karier yang dijabat oleh PNS dilingkungan Departemen

Dalam Negeri yang bertugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam wilayah kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya, camat dibantu oleh perangkat daerah kecamatan. Secara struktural camat berada langsung dibawah bupati, akan tetapi pertanggung jawabannya dilakukan secara administratif melalui sekretaris daerah kabupaten/ kota.

Dalam kerangka otonomi daerah, tugas dan fungsi camat ditempatkan sebagai seorang pemimpin yang dianggap memiliki kemampuan lebih yang kemudian dipercayakan untuk mengatur masyarakat di wilayah kecamatan. Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah. Tugas-tugas umum pemerintahan yang diselenggarakan oleh camat diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 yang menjelaskan Tugas Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dukung dengan Peraturan Bupati Gowa Nomor 9 Tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi Camat Bontonompo dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:

- a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program

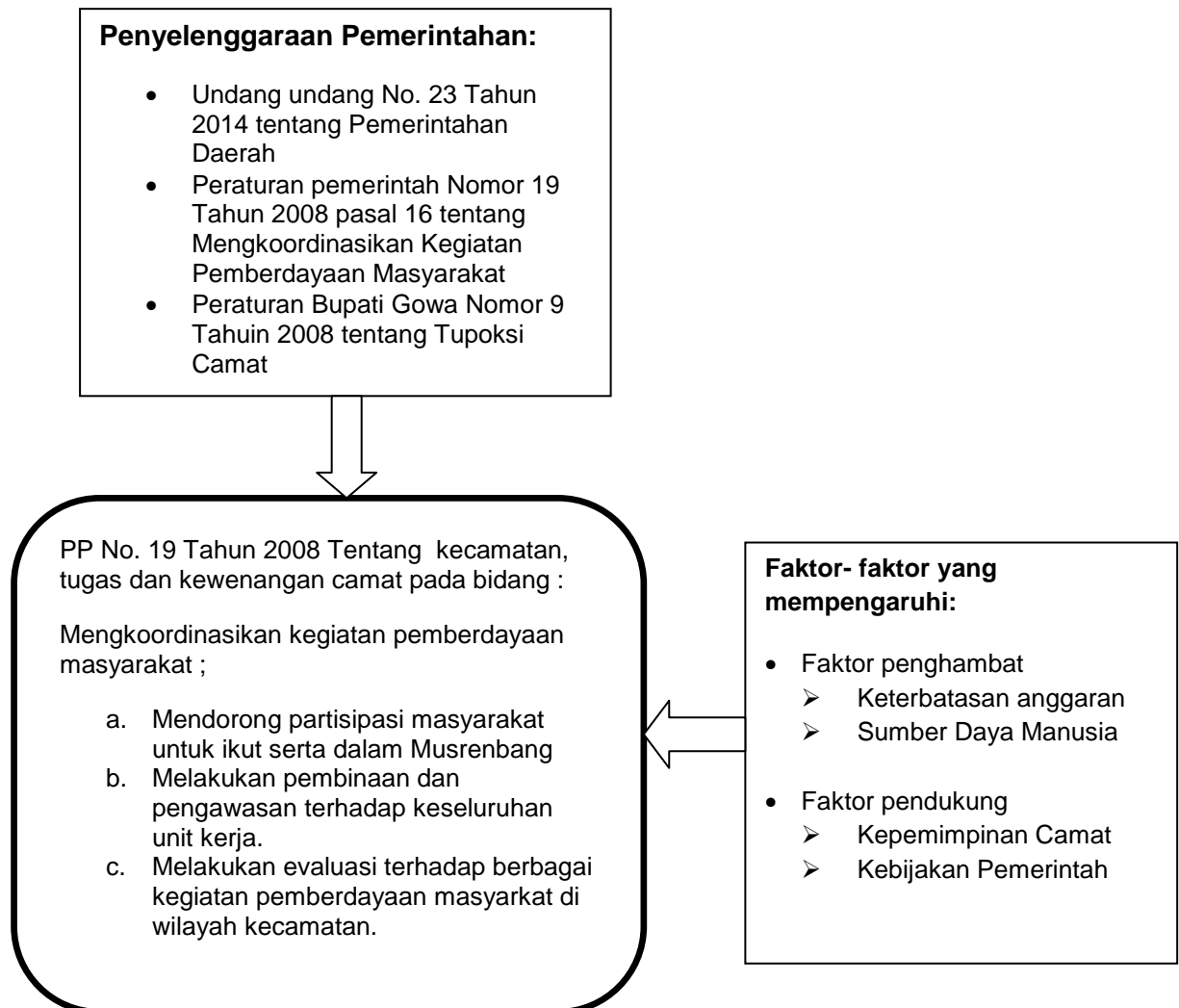


kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan

- c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menggambarkan skema kerangka koseptual sebagai berikut.

**Gambar F. Skema Kerangka konseptual**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa dimana titik pengambilan data penelitian tentang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada (1). Kantor Camat Bontonompo, (2). Kantor Desa Barembeng, (3). Kantor Desa Bontolangkasa , (4). Kantor Lurah Tamallayang, (5). Kantor Lurah Kalaserena.

#### **3.2. Tipe penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran serta memahami dan menjelaskan tentang kewenangan atributif camat di kecamatan Bontonompo Kabupaten gowa.

#### **3.3. Teknik Pengumpulan Data**

1. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melalui interview secara langsung dengan informan.

3. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan penelusuran literatur yang berupa buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

#### **3.4. Sumber data**

Data yang digunakan dalam proposal penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya, data primer di peroleh melalui :
  - a. Observasi yaitu pengumpulan data dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek penelitian.
  - b. Interview atau wawancara mendalam (*in dept interview*) yaitu mengadakan wawancara dengan informan yang bertujuan untuk menggali informasi yang lebih mendalam tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
2. Data Sekunder adalah data yang telah diolah sebelumnya yang diperoleh dari studi kepustakaan. Adapun data sekunder diperoleh melalui Studi pustaka yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur atau buku-buku atau data terkait dengan topik penelitian. Ditambah penelusuran data online, dengan pencarian data melalui fasilitas internet.

3. Dokumentasi yaitu arsip-arsip, laporan tertulis atau daftar inventaris yang diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan. Menurut Arikunto, dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.

### **3.5. Informan Penelitian**

Informan merupakan salah satu anggota kelompok partisipan yang berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan-muatan budaya atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampling* Yaitu, teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan.

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah :

1. Camat Bontonompo
2. Staf kecamatan Bontonompo
3. Kepala desa/Lurah di kecamatan Bontonompo
4. Tokoh masyarakat, tokoh agama,dan tokoh pemuda di kecamatan Bontonompo

## 5. Masyarakat di kecamatan Bontonompo

### 3.6. Defenisi Konsep

Setelah beberapa konsep diuraikan dalam hal yang berhubungan dengan kegiatan ini, maka untuk memberikan suatu pemahaman agar memudahkan penelitian penulis memberikan beberapa batasan penelitian, dan fokus penelitian, yang dapat dijadikan acuan dalam meneliti yakni:

1. Pemerintah daerah yang dimaksud disini adalah camat kecamatan Bontonompo kabupaten Gowa yang mempunyai peranan besar dalam pelaksanaan kewenangan atributif di bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa
2. Kewenangan atributif camat yang dimaksud adalah bagaimana camat Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 kemudian diperjelas lagi pelaksanaannya dalam Peratutran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 sebagai berikut:
  - a) Partisipasi adalah mengikutsertakan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Partisipasi masyarakat Bontonompo Kabupaten Gowa untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan.
  - b) Pembinaan adalah suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan yang menunjukkan kepada “perbaikan”. Sedangkan,

Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar proses pemerintahan di kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. dalam hal ini melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan Bontonompo Kabupaten gowa.

- c) Evaluasi adalah melakukan penilaian, atas segala sesuatu yang diamati, berdasarkan hasil perbandingan atau pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.

Kemudian ditetapkan indikator untuk mengukur tingkat kemampuan camat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya di kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, antara lain: tingkat partisipasi masyarakat dalam menghadiri musrenbang, tingkat keberhasilan pembangunan dan kemampuan masyarakat dalam melaksanakan program kegiatan pemberdayaan masyarakat, serta bentuk evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan.

3. Keberhasilan dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam menjalankan kewenangan atributif camat di bidang pemberdayaan masyarakat di kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa dapat

dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung upaya.

### **3.7. Analisis Data**

Data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan melalui kata dan kalimat hasil penelitian yang diperoleh dalam bentuk data kuantitatif maupun kualitatif. proses analisa data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data. Penyajian data dalam bentuk tabel, skema, grafik, maupun dalam bentuk narasi.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini, diuraikan gambaran temuan tentang penelitian yang terkait dengan kewenangan atributif camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, karakteristik responden serta faktor-faktor yang mempengaruhi camat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Kecamatan Bontonompo adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Gowa, yang saat ini dipimpin oleh seorang Camat yang bernama M. Yasin Mallinkai, S.S, M.Si .

Kecamatan Bontonompo merupakan Kecamatan yang terletak di perbatasan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar yang memiliki 3 (tiga) Kelurahan dan 11 (sebelas) Desa.

#### **4.1. Profil Daerah Penelititan**

##### **4.1.1 Kondisi Geografis**

Kecamatan Bontonompo merupakan satu dari 18 kecamatan di kabupaten Gowa, provinsi Sulawesi Selatan. Terletak di bagian selatan Sungguminasa, ibu kota kabupaten Gowa, dengan jarak 17 km searah jalan nasional menuju Takalar dan Jeneponto. Bontonompo terdiri atas 14 desa/kelurahan yang dibagi kedalam tiga kelurahan dan 11 desa.

Dibentuk berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2005. Ibukota kecamatan Bontonompo adalah Tamallaeng. Bontonompo berbatasan

dengan beberapa wilayah di Gowa dan Takalar. Pada sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Pombangkeng Utara kabupaten Takalar, sebelah selatan dengan kecamatan Bontonompo Selatan, sebelah barat dengan Bajeng Barat dan kecamatan Galesong, sebelah utara dengan kecamatan Bajeng.

**Gambar 1. Peta Kecamatan Bontonompo**



Letak Geografis adalah letak suatu wilayah atau negara sesuai dengan kenyataannya di permukaan bumi dan didasarkan pada keadaan alam di sekitarnya, adapun letak geografis dan wilayah Bontonompo Menurut Desa/Kelurahan di Tahun 2015 yaitu dapat dilihat Dari tabel 2.

**Tabel 2.Letak Geografis dan Wilayah Kecamatan Bontonompo  
Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2015**

Desa/Kelurahan	Seba Besar Wilayah	Batas Wilayah			
		Sebelah Utara	Sebelah Timur	Sebelah Selatan	Sebelah Barat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01.Manjapai	Dataran	Bt.Lks.Ut	Kab.Takalar	Tanrara	Jipang
02.Barembeng	Dataran	Romanglasa	Bt.Lks.selata n	Kab. Takalar	Sengka
03.K.Barembeng	Dataran	Barembeng	Romanglasa	Kab. Takalar	Sengka
04.Bontolangkasa selatan	Dataran	Bt.Lks.Ut	Kab. Takalar	Barembeng	Katangka
05.Bategulung	Dataran	Bt.Lks.Ut	Bt.Lks.Ut	Manjapai	Kab. Takalar
06.Bontolangkasa utara	Dataran	Tamallayang	Kab. Takalar	Barembeng	Bt.Lks.Sel
07.Katangka	Dataran	Tamallayang	Bt.Lks.Ut	Barembeng	Manjapai
08.Kalaserena	Dataran	Kec.Bajeng	Kab. Takalar	Tamallayang	Bt.Lks.ut
09.Tamallayang	Dataran	Kec. Bajeng	Kalaserena	Bontonompo	Bt.Lks.Ut
10.Bontonompo	Dataran	Kec. Bajeng	Tamallayang	Bontobiraeng	Bt.Lks.Ut
11.Bontobiraeng selatan	Dataran	Kec.Bajeng	Bontonompo	Romanglasa	Barembeng
12.Bontobiraeng Utara	Dataran	Bontobiraeng Selatan	Tamallayang	Barembeng	Romanglasa
13.Romanglasa	Dataran	Kec. Bajeng	Bontobiraeng	Kab. Takalar	Barembeng
14.Bulogading	Dataran	Bontobiraeng	Romanglasa	Barembeng	Kab. Takalar

Sumber : Badan Pusat Stastik Kabupaten Gowa 2016

Dilihat dari table letak geografis diatas ,Dapat diambil kesimpulan bahwa kecamatan Bontonompo merupakan daerah dataran rendah.Dimana ibu kota dari kecamatan Bontonompo terletak dikelurahan Bontonompo yang batas wilayahnya yaitu pada sisi utara kec. Bajeng, disisi Timur kelurahan Tammalayang, disisi Selatan kelurahan Bontobiraeng dan bagian sisi barat Bt Lks Ut. Kecamatan Bontonompo juga merupakan daerah perbatasan, yaitu antara Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar.

Pembagian Luas Daerah merupakan hal yang perlu diperhatikan , mengingat pembagian luas wilayah merupakan ukuran/besaran suatu wilayah untuk melihat batasan-batasan luas wilayah tersebut, Adapun pembagian Luas wilayah Desa/kelurahan Kecamatan Bontonompo Dapat dilihat dari tabel 3.

**Tabel 3. Pembagian luas wilayah Desa/Kelurahan Kecamatan Bontonompo.**

<b>No</b>	<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>Luas (KM2)</b>
1	Manjapai	3,25
2	Barembeng	2,14
3	K. Barembeng	2,34
4	Bontolangkasa selatan	1,68
5	Bategulung	2,27
6	Bontolangkasa utara	2,23
7	Katangka	3,68
8	Kalaserena	2,34
9	Tamallayang	1,75
10	Bontonompo	3,45
11	Bontobiraeng selatan	1,43
12	Bontobiraeng utara	2,76
13	Romanglasa	1,50
14	Bulogading	2,80
	<b>Jumlah</b>	<b>33,62</b>

Sumber : Profil Kependudukan Kabupaten Gowa (2015)

Setelah melihat dan mengamati table diatas maka dapat diketahui bahwa Jumlah Luas wilayah Kecamatan Bontonompo dari 14 kelurahan adalah 33,62 KM2 yang di mana kelurahan Katangka merupakan daerah terluas dengan jumlah luas daerah 3,68 KM2 dandisusul oleh kelurahan Bontompo dengan Luas Daerah 3,45 KM2, Selanjutnya Kelurahan Manjapai dengan Luas Daerah 3,25 KM2, Kelurahan Bulogading Dengan Luas Daerah 2,80 KM2, Kelurahan Bontobiraeng Utara dengan luas Daerah 2,76 KM2, Dan Kelurahan K. Barembeng dan Kelurahan Kalaserena yang mempunyai luas daerah yang sama yaitu 2,34 KM2, Kelurahan Bategulung dengan luas daerah 2,27 KM2, Kelurahan Bontolangkasa dengan luas daerah 2,23 KM2, Kelurahan Barembeng dengan Luas Daerah 2,14 KM2, kelurahan Tammalayang dengan luas daerah 1,75 KM2, kelurahan Bontolangkasa Selatan 1,68 KM2, Kelurahan Romanglasa dengan luas daerah 1,50 KM2 dan adapun luas daerah terkecil yaitu Kelurahan Bontobiraeng Selatan dengan Luas daerah 1,43 KM2.

#### **4.1.2. Kondisi penduduk**

Berdasarkan profil kependudukan Kabupaten Gowa Pada akhir tahun 2014, jumlah penduduk di kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa adalah 42.646 jiwa, terdiri dari laki-laki 20.621 jiwa dan perempuan

22.621 jiwa. Distribusi penduduk di tiap Desa/Kelurahan dapat dilihat pada tabel 4.

**Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk		Jumlah (%)
		Pria	Wanita	
1	Bontonompo	2.235	2.345	0.62%
2	Tamallayang	2.659	2.854	0,74%
3	Kalaserena	1.629	1.673	0.44%
4	Bontolangkasa utara	1.249	1.362	0,35%
5	Bontolangkasa selatan	1.651	1.819	0,47%
6	Baerembeng	1.758	1.877	0.49%
7	Manjapai	1.524	1.558	0,41%
8	Bontobiraeng utara	885	953	0.25%
9	Romanglasa	1.251	1.282	0.34%
10	Katangka	919	1.057	1,69%
11	Bulogading	747	819	0.21%
12	Bategulung	937	993	0,26%
13	Kalebarembeng	1.668	1.868	0.48%
14	Bontobiraeng selatan	1.509	1.564	0.41%
		<b>20.621</b>	<b>22.025</b>	<b>5.71%</b>

Sumber : Profil Kependudukan kabupaten Gowa (2015)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa wilayah Desa Katangka mempunyai jumlah penduduk paling banyak yaitu 1.976 jiwa atau sekitar 1.69 % yang terdiri atas 919 jiwa penduduk laki-laki dan 1.057 jiwa penduduk wanita. Sebaliknya wilayah Desa Bulogading mempunyai jumlah penduduk paling sedikit yaitu 1.566 jiwa atau sekitar

0.21% yang terdiri atas 747 jiwa penduduk laki-laki dan 819 jiwa penduduk wanita.

**Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan  
di Kecamatan Bontonompo Tahun 2011-2014**

Tahun 2011 - 2015 Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk					Pertum- -bahan Penduduk 2011- 2015
	2011	2012	2013	2014	2015	
01. Manjapai	3.183	3.236	3.337	3.300	3.329	0.90
02. Barembeng	3.366	3.422	3.528	3.488	3.519	0.89
03. Kalebarembeng	3.317	3.372	3.477	3.438	3.468	0.89
04. Bontolangkasa Selatan	3.303	3.358	3.462	3.423	3.454	0.90
05. Bategulung	1.685	1.713	1.766	1.746	1.761	0.89
06. Bontolangkasa Utara	2.588	2.631	2.713	2.683	2.707	0.90
07. Katangka	1.868	1.899	1.958	1.936	1.954	0.90
08. Kalaserena	2.882	2.930	3.021	2.987	3.013	0.89
09. Tamallayang	5.067	5.151	5.311	5.252	5.298	0.90
10. Bontonompo	3.962	3.028	4.154	4.107	4.143	0.90
11. Bontobiraeng Selatan	2.899	2.947	3.039	3.005	3.031	0.89
12. Bontobiraeng Utara	1.732	1.760	1.815	1.795	1.811	0.90
13. Romanglasa	2.321	2.360	2.433	2.406	2.428	0.91
14. Bulogading	1.517	1.542	1.590	1.572	1.586	0.89
<b>Jumlah</b>	<b>39.690</b>	<b>40.349</b>	<b>41.604</b>	<b>41.138</b>	<b>41.502</b>	<b>0.90</b>

Sumber :Badan Pusat Statistik kabupaten Gowa (2015)

## 4.2. Gambaran Umum Kantor Kecamatan Bontonompo

### 4.2.1. Visi dan Misi Kecamatan Bontonompo

#### a. Visi dan Misi Kecamatan Bontonompo

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi sangat terkait dengan cita-cita atau keinginan suatu daerah untuk menggunakan seluruh potensinya yang dideskripsikan secara jelas dan ringkas yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui implelementasi rencana strategis yang telah ditetapkan.

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Bontonompo sebagaimana diuraikan, maka merumuskan visi kecamatan Bontonompo yang mempunyai peran dan fungsi dalam menjabatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan serta dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah sebagaimana diuraikan terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus didukung oleh sumber daya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dn efisien serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya bertolak dari kondisi actual dewasa ini dan merujuk pada visi Bupati/Wakil Bupati Gowa terpilih serta engan memperhatikan visi pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 yaitu **“Sulawesi**



***Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018***”, maka dirumuskan visi lima tahunan kabupaten gowa yang merupakan penuntun dalam pelaksanaan pembangunan, juga sebagai pengejawantahan dari cita-cita dan aspirasi masyarakat di daerah ini yang telah dikristalisasikan dan diformulasikan dalam perspektif 5 (lima) tahun ke depan. **Adapun Visi Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021** adalah :

***“Terwujudnya Masyarakat yang Berkualitas, Mandiri dan Berdaya Saing dengan Tata kelola Pemerintahan yang Baik”***

Berdasarkan Visi Kabupaten Gowa tersebut Diatas, maka dirumuskan Visi Kecamatan Bontonompo Yaitu :

***“Terwujudnya Kualitas hidup masyarakat dengan pelayanan prima professional dan transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan”***

Visi Kecamatan Bontonompo dijabarkan ke dalam beberapa misi, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kesejahteraan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kesekretariatan.
2. Meningkatkan keberdayaan masyarakat.
3. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga.

**b. Tujuan dan sasaran jangka menengah kantor Kecamatan Bontonompo**

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun adapun tujuan dan sasaran Kecamatan Bontonompo berdasarkan misinya adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Misi 1 :

1) Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan dan kelurahan, dengan sasaran :

a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan public pemerintah kecamatan dan kelurahan.

2. Tujuan Misi 2 :

1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat kecamatan dan kelurahan. Dengan sasaran :

a. Meningkatnya keberdayaan kelembagaan masyarakat kecamatan dan kelurahan.

3. Tujuan Misi 3 :

1) Mengembangkan kegiatan-kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga, dengan sasaran :

a. Berkembangnya kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat dan keluarga.

#### **4.1.4. Struktur Organisasi Kecamatan dan Pembagian Tugas**

Berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 53 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Kecamatan Kabupaten Gowa diatur tugas dan fungsi aparat di Kantor Kecamatan Bontonompo sebagai berikut.

##### **a. Camat**

Camat Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa mempunyai tugas yang terdiri dari kewenangan atributif maupun kewenangan delegatif yang dimiliki sebagai berikut.

(1) Seorang camat mempunyai tugas pokok memimpin kecamatan dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat desa, kelurahan, perekonomian, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat serta pembinaan sekretariat kecamatan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

(2) Rincian tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, sebagai berikut:

- a. Membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan program dan kegiatan dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat desa/kelurahan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - d. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
  - e. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
  - f. Membina dan mengarahkan sekretaris kecamatan , para kepala sub bagian dan kepala seksi dalam melaksanakan tugasnya;
  - g. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan rumah tangga, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan (asset), dan keuangan kecamatan;
  - h. melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas pegawai dalam lingkup kecamatan;
  - i. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
  - j. menilai prestasi kerja sekertaris kecamatan, para kepala sub bagian dan kepala seksi pembinaan dan pengembangan karier;
  - k. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, camat mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian otonomi daerah;
  - b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan pelayanan dan ketertiban umum ;
- d. Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- g. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- i. Pembinaan dan pelaksanaan kesektariatan kecamatan;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya;

#### **b. Sekretariat**

Sekretariat di lingkup kecamatan Bontonompo terdiri atas Sub bagian umum dan kepegawaian, Sub bagian perencanaan dan pelaporan serta Sub bagian keuangan. Berikut penjelasan tugas dan fungsi sekretaris Kecamatan.

##### **1) Sekretaris**

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, member tugas, memberi petunjuk , melihat, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggara tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta pengelolaan keuangan dalam lingkup kecamatan. Rincian tugas sebagaimana yang dimaksud yakni sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan sekretariat kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan surat menyurat untuk kepentingan dinas;
- c. Menerima, meneliti, mengagenda dan mendistribusikan surat-surat masuk dan surat keluar;
- d. Mengelola urusan rumah tangga;
- e. Mengelola urusan administrasi keuangan;
- f. Mengelola urusan administrasi kepegawaian;
- g. Mengelola urusan administrasi perlengkapan dan peralatan;
- h. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program/kegiatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, sekretaris kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan asset, perencanaan dan pelaporan , serta keuangan;
- b. Pemberian Dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang umum , kepegawaian perlengkapan dan asset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang umum, kepega, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kesekretariatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

## 2) Sub Bagian Umum

Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian, mempunyai tugas merencanakan kegiatan, memberi petunjuk memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan administrasi umum kepegawaian lingkup kecamatan. Rincian tugas sebagaimana dimaksud yakni sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan dibidang umum dan kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. Mengelola melaksanakan urusan rumah tangga dan surat menyurat;
- c. Mengelola dan melaksanakan urusan kearsipan;
- d. Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokoleran dan perjalanan dinas;
- e. Mengelola dan melaksanakan urusan dan ketatalaksanaan;
- f. Mengelola dan melaksanakan urusan perlengkapan;
- g. Mengelola dan melaksanakan urusan kepegawaian;
- h. Mengelola dan melaksanakan urusan umum lainnya;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- j. Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;



- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang umum dan kepegawaian;
- c. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang umum dan kepegawaian ;
- d. Pelaksaaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

### 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub bagian perencanaan dan pelaporan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian, mempunyai tugas merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, member tugas, membimbing, memeriksa/mengecek, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan tugas sub bagian perencanaan dan pelaporan lingkup kecamatan. Rincian tugas sebagaimana dimaksud yakni sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan jadwal kegiatan operasional tahunan kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana kerja kecamatan;
- c. Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan program dan lingkungan kecamatan;

- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian perencanaan dan pelaporan ;
- g. Menginventarisir permasalahan-permasalahan pelaksanaan program kegiatan;
- h. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian perencanaan dan pelaporan;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LAKIP, RENSTRA dan RENJA;
- j. Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala sub bagian perencanaan dan pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan pelaporan;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan pelaporan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan pelaporan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4) Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian, mempunyai tugas merencanakan kegiatan, member petunjuk, member tugas, membimbing, memeriksa/mengecek. Menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan urusan keuangan, kegiatan kebendaharaan lingkup kecamatan. Rincian tugas sebagaimana dimaksud yakni sebagai berikut :

- a. membuat rencana operasional program kerja sub bagian;
- b. mempersiapkan bahan-bahan dan menyusun rencana kebutuhan anggaran di lingkungan kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. membuat daftar usulan kegiatan;
- d. membuat daftar gaji dan melaksanakan pengajian;
- e. menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
- g. mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran untuk periode tahunan dan lima tahunan;
- h. Mengelola dan melaksanakan verifikasi anggaran;
- i. Mengelola dan melaksanakan pembukuan dan pelaporan keuangan;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian keuangan;

- k. Melaksanakan pengendalian tugas pembantu poemegang kas;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, kepala sub bagian keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan;
- b. pemberian dukungakan atas pelaksanaan tugas dibidang keuangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang keuangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dang fungsinya.

### **c. Seksi- Seksi**

#### **1) Seksi Pemerintahan**

Kepala seksi pemerintah mempunyai tugas pokok membantu camat dalam membina mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang pemerintahan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala seksi pemerintahan mempuyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pemerintahan
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan
- c. Pembinaan dalam pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

Rincian tugas sebagaimana dimaksud diatas yakni sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program dann kegiatan seksi pemerintahan sebagai pedoman melaksanakan tugas
- b. Menyelenggarakan fasilitasi pemilihan kepala desa dan badan perwakilan desa
- c. Menyelenggarakan lomba atau penilaian Desa/Kelurahan tingkat kecamatan
- d. Menyelenggarakan fasilitasi kerjasama antar desa /kelurahan dan penyelesaian perselisihan antar Desa/Kelurahan
- e. Memfasilitasi penataan Desa/ kelurahan dan penyusunan peraturan desa
- f. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan , inventarisasi asset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya.
- g. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait
- h. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan.
- i. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan

- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

## 2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala seksi ketentraman dan ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas dibidang ketentraman dan ketertiban umum. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. Penyusunan program dan rencana kerja seksi ketentraman dan ketertiban;
- b. Pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada camat di bidang ketentraman dan ketertiban.;
- c. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada camat;
- d. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan;
- e. Penyelenggaraan tugas pembantuan tugas lain yang diberikan sesuai fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban , ideology dan kesatuan , bangsa serta kemasyarakatan.;
- c. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan kesatuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat diwilayah kerjanya;
- d. Menyelenggarakan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antarumat beragama;
- e. Menegakkan dan melaksanakan peraturan daerah dan keputusan bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya diwilayah kerjanya;
- f. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
- g. Memantau , mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- h. Melaksankan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban umum.;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang ttugas yang diberikan oleh camat;
- j. Dalam melaksanakan tugasnyabertanggung jawab kepada Camat

### 3) Seksi Perekonomian

Kepala seksi perekonomian mempunyai tugas pokok membantu camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas dibidang perekonomian. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala seksi perekonomian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan rencana kerja seksi perekonomian;
- b. pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat dibidang perekonomian;
- c. penyelenggaraan perekonomian sesuai dengan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat;
- d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan perekonomian dan di kecamatan;
- e. penyelenggaraan tugas pembantuan tugas lain yang diberikan sesuai fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud yakni sebagai berikut :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi perekonomian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha perekonomian di wilayah kerjanya;
- c. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pengembangan perekonomian Desa/Kelurahan di wilayah kerjanya;



- d. Melaksanakan kegiatan dibidang pemberian rekomendasi dan perijinan tertentu sesuai dengan kewenangannya;
- e. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
- f. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi perekonomian;
- h. Melaksanaan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh camat;
- i. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada camat.

#### 4) Seksi Kesejahteraan Sosial

Kepala seksi kesejahteraan sosial mempunyai tugas pokok membantu camat dalam membina , mengkoordinasi dan melaksanakan tugas dibidang kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, kepala seksi kesejahteraan sosial menyelenggarakan fungsi yakni :

- a. Penyusunan program dan rencana kerja seksi kesejahteraan sosial;

- b. Pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat di bidang kesejahteraan sosial;
- c. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat;
- d. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan;
- e. Penyelenggaraan tugas pembantuan tugas lain yang diberikan sesuai dengan fungsinya

Rincian tugas sebagaimana dimaksud diatas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi kesejahteraan sosial sebagaimana pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan , generasi muda dan keolahragaan , kebudayaan , kepramukaan serta peranan wanita;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat;
- d. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan;
- e. mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan dibidang pencegahan dan penanggulangan bencana alam , pengungsi dan masalah sosial;
- f. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;

- g. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan ;
- h. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil dan pelaksanaan kegiatan seksi kesejahteraan sosial;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat;
- j. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.

#### 5) Seksi Pembangunan

- (1) Kepala seksi pembangunan mempunyai tugas pokok membantu camat dan membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas dibidang pembangunan
- (2) Dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi pembangunan penyelenggaraan fungsi.
  - a. penyusunan program dan rencana kerja seksi pembangunan
  - b. pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat dibidang pembangunan
  - c. Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.
  - d. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di wilayah kecamatann

- e. Penyelenggaraan tugas pembantuan dan tugas lain yang diberikan sesuai dengan bidang tugas

(3). Rincian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi pembangunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan Desa/Kelurahan diwilayah kerjanya.
- c. Melaksanakan dan memfasilitasi pemungutan atas pajak dari retribusi daerah diwilayah kerjanya
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat
- e. Penyelenggaraan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat
- f. Penyelenggaraan fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- g. Menyenggarakan koordinasi dengan instansi dan unit kerja terkait.
- h. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan
- i. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil dan pelaksanaan kegiatan seksi pembangunan

- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat
- k. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.

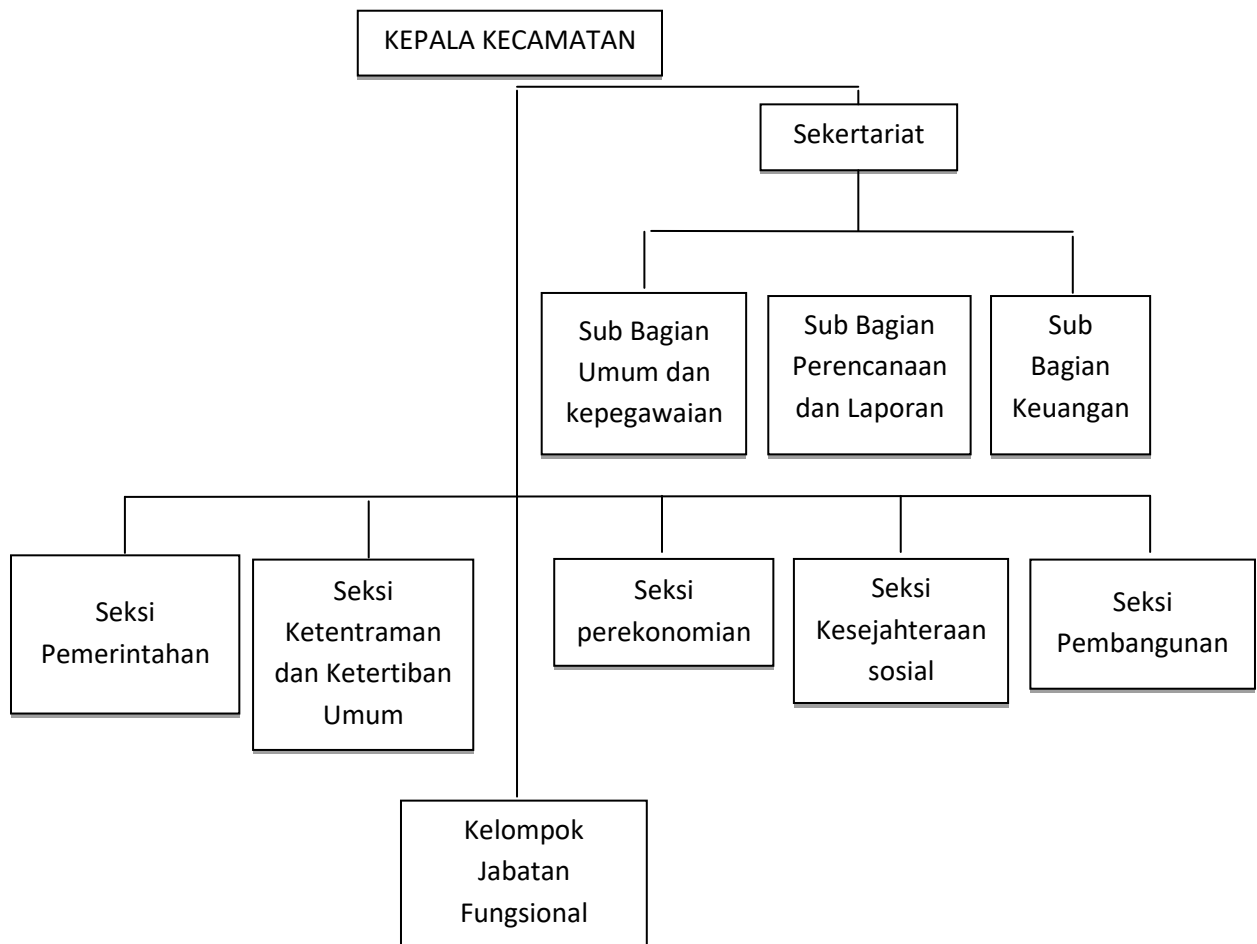
#### 6) Tata Kerja

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pelaksanaannya
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tiap pada waktunya

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk laporan penyusunan hasil lebih lanjut dan untuk diberikan petunjuk kepada bawahannya
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab masing-masing dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, diharapkan mengadakan rapat-rapat berkala
- (8) Dalam memperlancar pelaksanaan tugas masing-masing pimpinan organisasi dan/pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan, melekat, pengendalian serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pejabat dan/atau staf dilingkungan unit kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (9) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas dan sumber daya pegawai pada bawahannya
- (10) Masing-masing pejabat struktural dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan dan/atau atasan langsungnya sesuai dengan hirarki jenjang jabatan.



**Gambar 2. Struktur Organisasi Kecamatan Kabupaten Gowa**



### 4.3. Sumber Daya Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa

#### 4.3.1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa memiliki pegawai sebanyak 40 orang. Dari jumlah tersebut 25 diantaranya pegawai kecamatan dan 15 orang pegawai kelurahan. Jumlah pejabat Eselon III sebanyak 2 orang



yaitu camat dan sekretaris Kecamatan, pejabat Eselon IV sebanyak 18 orang terdiri dari pejabat Eselon IVa sebanyak 7 orang (4 Kepala Seksi di kecamatan dan 3 lurah) dan Pejabat Eselon IVb sebanyak 11 orang (3 Kasubag di sekretariat kecamatan, 3 sekretariat lurah dan 5 kepala seksi di kelurahan) dan fungsional umum (pelaksana) sebanyak 20 orang yang terdiri dari 16 orang fungsional umum kecamatan dan 3 orang fungsional umum kelurahan.

Rincian pegawai berdasarkan unit kerja sesuai Eselon, golongan ruang dan jenis pendidikan terakhir di lingkungan Kecamatan Bontonompo Kabupten Gowa dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 7. Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan**

No	Uraian	Eselon I		Eselon II		Eselon III		Eselon IV		Fungsional Umum		Honorar		jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kec.Bontonompo	-	-	-	-	2	-	5	2	14	4	1	-	22	6
2	Kel. Bontonompo	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
3	Kel. Tammala yang	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	-	-	4	3
4	Kel. Kalase'	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	5	-
	<b>Jumlah</b>	-	-	-	-	2	-	14	4	17	5	1	-	34	9

Sumber : Sekretariat Kecamatan Bontonompo Tahun 2016

**Tabel 8. Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan Ruang**

No	Uraian	Gol IV		Gol III		Gol II		Gol I		Honorer		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kec.Bontonompo	1	-	9	2	11	4	-	-	1	-	22	6
2	Kel. Bontonompo	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
3	Kel. Tammalayang	-	-	4	3	-	-	-	-	-	-	4	3
4	Kel. Kalase'rena	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	6	-
	<b>Jumlah</b>	-	-	21	5	11	4	-	-	1	-	34	9

Sumber :Sekretariat kecamatan Bontonompo Tahun 2016

**Tabel 9. Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan terakhir**

No	Uraian	Starata II		Starata I		Diploma II/III		SMA/SMK sedereajat		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kec.Bontonompo	-	-	-	-	2	-	5	2	14	4
2	Kel. Bontonompo	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
3	Kel. Tammalayang	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1
4	Kel. Kalase'	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-
	<b>Jumlah</b>	-	-	-	-	2	-	14	4	17	5

Sumber : Sekretariat Kecamatan Bontonompo Tahun 2016

#### 4.3.2. Sarana dan Prasarana Kerja

Sarana dan prasarana kerja yang tersedia merupakan salah satu penunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Secara umum sarana dan Prasana sebagaimana terurai dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 10. Daftar Jumlah Sarana dan Prasarana (asset) Lingkup Kecamatan Bontonompo.**

No	Nama Barang	Jumlah
1	Meja padium	1 Unit
2	Lemari Kayu	6 Unit
3	Kursi Rapat Chitase	50 Unit
4	Komputer	2 Unit
5	Printer	1 Unit
6	Mobil	2 Unit
7	Motor	9 Unit
8	AC	1 Unit
9	Wirelex	1 Unit
10	Kursi Tamu	1 Set
11	Meja Biro	14 Unit
12	Kursi Rapat Plastik	120 unit
13	Kursi Putar	5 Unit
14	Papan Potensi	1 Unit
15	Lemari Arsip	2 Unit
	<b>Jumlah</b>	<b>216</b>

Sumber : Sekretriati Kecamatan Bontonompo Tahun 2016

#### **4.4. Pelaksanaan Kewenangan Atributif Camat dalam Bidang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa**

Kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat dan diberikan kepada suatu institusi atau pejabat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewenangan atributif camat diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan di perjelas oleh Peraturan Pemerintah

Nomor 19 Tahun 2008. Di Kecamatan Bontonompo, pelaksanaan kewenangan atributif Camat didukung dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2008. Kewenangan ini semakin terlihat nyata dengan adanya peraturan tersebut. Salah satu Kewenangan atributif camat adalah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. Camat diangkat oleh bupati atau walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten atau kota terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

**Tabel 11. Program kegiatan pemberdayaan Masyarakat di kelurahan/desa di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa**

<b>Nama Desa/Kelurahan</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>
Kelurahan kalase'rena	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan kelompok Usaha perbengkelan dan meuble</li> <li>- Bantuan modal usaha anyaman dari rumbia dan usaha kue khas Makassar.</li> </ul>
Kelurahan Tammalayang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan Kelompok KUBE (kelompok bersama)-UEP (Usaha Ekonomi desa simpan Pinjam) OMS/Pembentukan Koperasi Unit Desa</li> <li>- Pembinaan Kelompok Usaha Wanita, Remaja dan karangtaruna</li> <li>- Pembinaan peningkatan produksi pertanian</li> </ul>
Desa Bontolangkasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan jahit-menjahit dan pengadaan mesin jahit</li> <li>- Pembinaan peningkatan produksi pertanian</li> </ul>
Desa Barembeng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan kerajinan bosara bagi ibu PKK</li> </ul>

Program kegiatan pemberdayaan yang telah dilaksanakan di Kecamatan Bontonompo khususnya di beberapa Desa dan Kelurahan dilakukan dengan memberikan bantuan berupa pelatihan-pelatihan kerajinan, pelatihan jahit-menjahit, dan memberdayakan anak-anak hingga remaja. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara oleh Kepala Desa Barembeng Nurhdi Haris, bahwa,

“di desa ini yang sangat aktif itu kegiatan ibu pkk. Setiap hari minggu ada kegiatan, pemerintah desa bekerja sama dengan PKK yaitu

pelatihan-pelatihan kerajinan dan bersih-bersih lingkungan desa. Pelatihannya itu membuat kerajinan seperti membuat bosara dan jahit menjahit dan biasanya ibu PKK menjual hasil kerajinannya dan hasil penjualannya akan disimpan untuk dipakai di kegiatan PKK yang lainnya. ( wawancara pada tanggal 24 Januari 2017).

Tidak hanya kegiatan pemberdayaan tersebut diatas yang dilakukan.

Adapun kegiatan lain dalam bidang pertanian dimana pemerintah Kecamatan memberikan pembinaan dan sosialisasi tentang peningkatan produksi pertanian di beberapa Desa dan Kelurahan seperti di Kelurahan Kalaserena. Kegiatan ini diikuti oleh kelompok-kelompok yang aktif seperti Majelis Taklim dan ibu PKK . Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Lurah Kalaserena, Bakri Imba mengungkapkan bahwa,

“untuk kelurahan kalaserena ini, kegiatan yang dilaksanakan antara lain dalam bidang pertanian contohnya pembinaan atau sosialisasi peningkatan produksi pertanian dan didalam kegiatan itu kami tanyakan kepada masyarakat kesiapan pupuk dan pestisida. Dan untuk kegiatan yang selalu dilaksanakan itu tidak terlepas dari kelompok-kelompok yang aktif disini seperti majelis taklim dan ibu PKK. (wawancara pada tanggal 24 januari 2017).

Selain pemberdayaan yang dilakukan dalam bentuk pembinaan peningkatan produksi pertanian, terdapat bentuk himbauan kepada Ibu Rumah Tangga untuk menghemat ekonomi dengan menanam sayuran di pekarangan rumah. Himbauan ini di dukung dengan pemberian pelatihan kepada masyarakat tentang pertanian oleh PPL. Hal ini diungkapkan oleh Lurah Tamallayang Alimuddin Sijaya bahwa,

“Ibu-ibu di berikan himbauan untuk bisa menanam sayur-sayuran di depan rumah masing-masing yang kosong untuk mendekatkan pasar agar masyarakat tidak terlalu banyak membeli di pasar hal ini dapat menghemat uang pangan kepala keluarga, ini kita berdayakan hanya di kelurahan tamalayyan ini. Dalam hal pembinaannya kami

mendatangkan PPL Pertanian yang turun langsung untuk memberikan pelatihan.(wawancara pada tanggal 24 januari 2017).

Bentuk-bentuk pembinaan dan pelatihan diatas menunjukan bahwa upaya pemerintah kecamatan menjalankan kewenangannya dalam bidang pemberdayaan semakin nyata terlihat. Namun, meskipun sifatnya melekat, pelaksanaan kewenangan atributif yang dimiliki camat, tidak terlepas dari koordinasi dengan Bupati. Hal ini diungkapkan Oleh Camat Bontonompo, M. Yasin Mallingkai, S.S, M.Si Bahwa,

“Tentu ada campur tangan Bupati, setiap minggu tepatnya pada hari senin coffee morning dan situlah kita bicarakan apa yang dilaksanakan di setiap kecamatan dilaporkan ke Bupati, nantinya Bupati yang sampaikan bahwa kita harus membantu dan mendukung kegiatan yang ada di setiap masing-masing di kecamatan selalu ada dukungan dari pak Bupati.(Wawancara pada Tanggal 19 Januari 2017).

Selain berkoordinasi dengan Bupati dalam pelaksanaan kewenangannya, Camat juga berkordinasi dengan para pemuda dan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan pembangunan di Kecamatan Bontonompo. Sesuai hasil wawancara dengan Tokoh Pemuda, Asriadi Aras, ST mengungkapkan bahwa,

“koordinasi kami dengan pemerintah selalu lancar agar bagaimana program yang kami jalankan dapat berjalan dengan sukses .bahkan dengan unsur terkait lainnya koordinasi kami selalu ada .pemerintah memberikan kesempatan kepada perwakilan-perwakilan pemuda untuk memberikan pendapat kami saat musrembang ataupun mengambil bagian dari setiap program pemberdayaan yang ada pemerintah juga memberikan bantuan dan di bina langsung oleh pemerintah sehingga sudah banyak sanggar-sanggar seni yang sudah berdiri.(Wawancara pada Tanggal.(Wawancara pada Tanggal 30 Januari 2017).

Selain berkoordinasi dengan para pemuda dan masyarakat, Camat Kecamatan Bontonompo juga lebih memaksimalkan koordinasi dengan Kepala Desa dan Kelurahan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar setiap program terkait pemberdayaan yang dilaksanakan setiap Desa dan Kelurahan dapat terkomunikasikan dengan baik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara oleh Kepala Desa Bontolangkasa Kaharuddin.S yang mengungkapkan bahwa,

“Koordinasi camat terhadap kegiatan di Desa Botolangkasa ini sudah sangat baik pemerintah desa selalu menyampaikan atau melaporkan kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa kepada Camat terlebih dahulu kemudian Camat sendiri menyaksikan atau langsung melihat kegiatan yang dilaksanakan.(wawancara pada tanggal 24 januari 2017).

Kewenangan atributif Camat dalam bidang pemberdayaan diatas, tidak hanya sebatas pada pemberian pelatihan dan pembinaan masyarakat. Namun, terlepas dari pada itu kewenangan atributif camat lebih jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Kecamatan, Tugas dan Kewenangan camat pada bidang . yakni 1) Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang, 2) Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Unit Kerja Terkait Pemberdayaan Masyarakat, 3) Melakukan Evaluasi terhadap Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk mengatur tingkat kemampuan Camat dalam pelaksanaan Kewenangannya di kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, antara



lain: Tingkat partisipasi masyarakat dalam menghadiri musrenbang, tingkat keberhasilan pembangunan dan kemampuan masyarakat dalam melaksanakan program kegiatan pemberdayaan masyarakat, serta bentuk evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan.

Berikut dipaparkan lebih jelas tentang kewenangan atributif camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

#### **4.3.1. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang**

Partisipasi menurut Verhangen (1979) merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut, dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh yang bersangkutan mengenai :

- a) Kondisi yang tidak memuaskan, dan harus diperbaiki;
- b) Kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau masyarakatnya sendiri;
- c) Kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan;
- d) Adanya kepercayaan diri, bahwa ia dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.

Adapun bentuk-bentuk partisipasi menurut Dusseldrop, (1981) diidentifikasi dalam kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat yang berupa:

- 1) Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat;
- 2) Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok;
- 3) Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain;
- 4) Menggerakkan sumberdaya masyarakat;
- 5) Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan;
- 6) Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.

Musrenbang kecamatan diselenggarakan untuk mensinkronkan hasil-hasil perencanaan partisipatif dari tingkat pembangunan dari Satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten/kota di kecamatan bersangkutan sehingga dapat menjadi suatu usulan yang terpadu untuk dibahas ke musrenbang daerah kabupaten/kota. Tentunya forum ini sangat penting bagi masyarakat pada tingkat kecamatan, sebab mereka dapat menyalurkan aspirasi mereka. Partisipasi masyarakat dalam forum musrenbang merupakan suatu hal yang urgen dalam pembangunan nasional maupun daerah.

Forum musrenbang yang diselenggarakan di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa dihadiri dari berbagai kalangan, yaitu Tim Musrenbang Kecamatan, Pemerintah kelurahan/Desa, Tokoh Masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh agama, dan Lembaga Swadaya Masyarakat, terlihat partisipasi masyarakat dinilai pasif. Hal ini sesuai dengan data absensi yang didapat dari hasil musrenbang Tingkat

Kecamatan Bontonompo bahwa dari 36 peserta Musrenbang tidak terdapat dari kalangan masyarakat (*Daftar Absensi Terlampir*). Namun di tingkat kelurahan partisipasi masyarakat jelas terlihat. Hal ini terbukti dengan daftar absensi peserta musrenbang di kelurahan Tamallayang (*Daftar Absensi Terlampir*). Selain dari data absensi, hal ini juga didukung dengan pernyataan dari Lurah Tamallayang Alimuddin Sijaya yang mengungkapkan bahwa,

“Saya melihat antusias masyarakat sangat baik terutama aparat kelurahan , RT, RW, kepala lingkungan, tokoh masyarakat dan termasuk pengurus LPM di Tamallayang ini. Untuk hal bagaimana mengundang atau memberi informasi tentang adanya musrenbang kami menggunakan undangan, kami memberi undangan kepada perwakilan masyarakat seperti ke pak RT atau RW, tokoh masyarakat dan LPM untuk ikut berpartisipasi dalam musrenbang namun tentunya masyarakat sebenarnya sudah tau dan menunggu dengan terlaksannya musrenbang karena masyarakat sendiri sangat ingin memberikan usulan persoalan-persoalan yang ada disekitar rumahnya masing-masing.(wawancara pada tanggal 24 Januari 2017).

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas terlihat bahwa terdapat upaya yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dalam mendorong partisipasi masyarakat dengan memberi undangan kepada perwakilan rakyat seperti ketua RT, RW, tokoh masyarakat dan LPM.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam forum musrenbang dalam hal ini berupa ide dan tenaga dimana dalam musrenbang masyarakat ataupun tokoh-tokoh sebagai perwakilan masyarakat yang hadir memberikan aspirasi dan usulan serta ikut ambil bagian dalam kegiatan

yang akan dilaksanakan dalam meningkatkan pembangunan di kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam forum musrenbang merupakan penentu keberhasilan dan ketepatan sasaran tujuan pembangunan. Pada mulanya, Musrenbang diperkenalkan sebagai upaya mengganti sistem sentralistik dan top-down. Masyarakat di tingkat lokal dan pemerintah punya tanggung jawab yang sama berat dalam membangun wilayahnya. Masyarakat seharusnya berpartisipasi karena ini merupakan kesempatan untuk secara bersama menentukan masa depan wilayah. Masyarakat juga harus memastikan pembangunan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.

#### **4.3.2. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Unit Kerja terkait kegiatan Pemberdayaan Masyarakat**

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja kegiatan pemberdayaan masyarakat ada beberapa hal yang perlu dilakukan Camat untuk mampu memberdayakan secara penuh setiap anggota masyarakatnya sekaligus untuk mampu mencapai tujuan bersama. Dari Kewenangan Camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja kegiatan pemberdayaan masyarakat ini maka ada 3 poin yang ditetapkan antara lain pengarahan, pembinaan dan pengawasan.

Untuk melihat secara jelas ketiga indikator ini dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini :

a. Pengarahan

Menurut Terry (2008:181) Directing atau pengarahan adalah mengintegrasikan usaha-usaha anggota suatu kelompok sedemikian rupa, sehingga dengan selesainya tugas-tugas yang diserahkan kepada mereka, mereka memenuhi tujuan-tujuan individual dan kelompok. Cara mengarahkan bawahan/staf yang tepat dilakukan oleh pemimpin adalah mengenai bawahannya, terbiasa dengan kecakapan dan kemampuan mereka, mengerti akan kapasitas dan perhatian mereka, mengetahui apa yang dapat mereka hasilkan, dan sudah mengamati perilaku mereka.

Pengarahan yang dilakukan Camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah salah satu hal yang sangat perlu dilakukan seorang Camat dalam kepastiannya selaku koordinator kegiatan pemberdayaan bagi masyarakatnya. Pengarahan yang dimaksud adalah bagaimana Camat mengarahkan masyarakatnya agar mampu melakukan program kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga tujuan yang diharapkan mampu tercapai. Dalam melakukan kewenangannya dalam melakukan pengarahan, Camat Bontonompo telah melakukannya dengan cukup baik, hal ini diungkapkan oleh salah satu kepala desa Barembeng Nurhadi Haris mengungkapkan bahwa,

“selaku kepala desa memang mempunyai garis koordinasi dengan lurah dan Camat, nah dalam melakukan pemberdayaan bagi

masyarakat, pak Camat selalu memberikan arahan-arahan kepada bawahannya sesuai apa yang telah direncanakan dan disepakati sebelumnya.(wawancara pada tanggal 24 januari 2017)

Melihat hasil wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa dalam melakukan kewenangan Camat Bontonompo telah melakukan hubungan kerja sesuai dengan peraturan Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan pada pasal 28 (2) yang menyatakan bahwa hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal diwilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional, hal tersebut di buktikan telah memberikah arahan baik di lingkup masyarakat maupun di lingkup pemerintahan.

#### b. Pembinaan

Dalam hal suatu pembinaan menunjukkan adanya suatu kemajuan peningkatan, atas berbagai kemungkiinan peningkatan, unsur dari pengertian pembinaan ini merupakan suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan pembinaan menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu istilah pembinaan hanya diperankan kepada unsur manusia, oleh karena itu pembinaan haruslah mampu menekan dan dalam hal-hal persoalan manusia.

Realitas yang terjadi di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, pemerintah Kecamatan mempunyai kepedulian yang massif terhadap kegiatan pemberdayaan yang ada di setiap Desa/Kelurahan, kepedulian

dalam memberikan bantuan pembinaan terhadap kegiatan pemberdayaan perempuan khususnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Ibu PKK.

Di Desa Bontolangkasa, kegiatan pembinaan jahit-menjahit sudah dilaksanakan selama 4 Tahun terakhir. Pemerintah memberikan bantuan berupa 5 (lima) mesin jahit agar membantu berjalannya pembinaan Jahit-menjahit untuk ibu rumah tangga. Dalam hal ini dilaksanakan pemerintah untuk memberi pekerjaan kepada ibu rumah tangga yang tidak mempunyai pekerjaan. Kegiatan pembinaan Jahit-menjahit ini dilanjutkan oleh Ibu PKK yang diketuai oleh Ibu Desa Bontolangkasa, kemudian Ibu Desa memberikan bantuan berupa Kain untuk mendukung pelaksanaan pembinaan jahit-menjahit. Pembinaan ini menghasilkan Baju siap pakai yang dapat dijual, selain itu kegiatan ini menerima jasa menjahit baju PDH untuk ASN di Kecamatan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan hidup Ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak mempunyai pekerjaan. Hal tersebut diungkapkan Dg.puji Selaku Ibu PKK sekaligus anggota dari kegiatan Jahit-menjahit bahwa,

“kegiatan jahit-menjahit dimana ibu desa sebagai ketua dari pkk. Kegiatan ini sudah berlangsung 4 tahun, selama 4 tahun belakangan kelompok ini sudah memiliki 5 macam mesin jahit, mesin jahit ini merupakan bantuan langsung dari pemerintah kabupaten dan pemerintah Kecamatan Bontonompo. Bahan yang di pakai untuk jahit-menjahit ini diberikan dari ibu desa dan anggota pkk yang menjahitnya. Ibu pkk biasanya menjahit baju kebaya yang nantinya dijual kepada masyarakat dan menerima jasa menjahit baju seragam PNS di kecamatan kemudian hasilnya atau untung yang didapatkan akan dibagi rata kepada semua anggota kelompok menjahit desa Bontolangkasa ini.(wawancara pada tanggal 24 Januari 2017).

Kegiatan yang dilaksanakan disetiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Bontonompo ini juga mendapatkan Pengawasan langsung oleh Camat. Hal ini didukung oleh pernyataan Kepala Desa Bontolangkasa Kaharuddin.S mengungkapkan bahwa,

“pembinaan dari kecamatan seperti memberikan kelompok jahit-menjahit ini seperti mesin jahit dan kain. Untuk pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat Kecamatan untuk setiap kegiatan Pemberdayaan di Desa Bontolangkasa Camat dan ibu Camat sendiri yang turun langsung melihat bagaimana berjalannya kegiatan ini.(wawancara pada tanggal 24 Januari 2017).

Selain itu adapun pembinaan berupa sosialisasi pupuk organik mengingat banyaknya persawahan dan kelompok Tani di kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Dalam melakukan kewenangannya dengan melakukan pembinaan, Camat Bontonompo sudah melakukannya dengan mendatangkan Dinas Pertanian hal ini diungkapkan kepala Desa Bontolangkasa Kaharuddin.S yang mengungkapkan bahwa,

“pembinaan camat terhadap masyarakat bisa dilihat dari hasil kelompok tani dengan adanya pembinaan yang diprakarsai oleh pak camat yang seringkali mendatangkan dinas pertanian untuk memberikan penyuluhan terkait masalah pertanian demi peningkatan kelompok tani dalam menggarap lahan persawahan mereka sehingga berjalan lancar dan menghasilkan jauh lebih besar.(wawancara pada tanggal 30 januari 2017)



**Tabel 12. Jumlah Kelompok Tani dan Anggota  
menurut Kelas di Kecamatan Bontonompo**

DESA	KELAS KELOMPOK						
	Pemula	lanjut	Madya	Utama	Jumlah	Jumlah anggota	LUAS (HA)
Barembeng	18	-	1	2	21	514	228,45
Kalebarembeng	19	2	2	-	13	469	124,96
Bontobiraeng	19	1	-	1	21	452	149,00
Bontobiraeng sel.	19	-	3	1	23	570	138,67
Kalase'rena	20	1	-	-	21	457	238,27
Bontonompo	17	1	1	1	20	486	184,09
Bontolangkasa Uta	19	2	2	-	20	499	224,98
Bontolangkasa Sel	19	1	3	2	25	649	268,53
Bategulung	20	-	-	-	20	513	267,82
Majapai	19	6	2	-	27	668	340,22
Romanglasa	19	-	2	-	21	593	126,24
Bulogading	20	-	2	1	20	510	197,97
Katangka	19	-	2	2	21	529	224,77
Tamallayang	20	-	2	-	22	562	274,23
Jumlah	257	14	22	10	303	7.471	2.988,2

Melihat dari uraian Tabel serta penjelasan kepala desa dapat disimpulkan bahwa Camat Bontonompo telah menjalankan kewenaangannya dalam pemberian pembinaan yang sebagaimana mestinya membina masyarakat dengan bekerja sama dengan dinas pertanian untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat.

c. Pengawasan

Pengawasan yaitu salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Pengawasan, Menurut Goerge R.Terry dalam pengertiannya pengawasan menitik beratkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana. Dengan demikian tindakan pengawasan ini tidak dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan, akan tetapi justru pada akhir suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut menghasilkan sesuatu.

Dengan pengawasan dapat diketahui sampai dimana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala dimasa yang akan datang. Jadi keseluruhan dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, Karena itu perlu criteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi:

1. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
2. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Pengawasan dilakukan dalam rangka menjaga kegiatan yang dijalankan tetap berada dalam koridor yang telah ditentukan, selain itu dengan pengawasan yang efektif hal-hal yang menyimpang dapat segera diperbaiki dan dikembalikan pada tempatnya.

Realitasnya, Kegiatan yang dilaksanakan oleh Karang Taruna di Kecamatan Bontonompo juga tidak terlepas dengan pengawasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah kecamatan. Hal tersebut diungkapkan Tokoh Pemuda Asriadi Aras, ST, bahwa,

“pengawasan pemerintah dalam kegiatan yang ada sudah baik, pemerintah mengawasi kegiatan mulai dari berjalannya suatu program hingga sudah terlaksannya kegiatan, Apabila pemerintah melihat ada yang kurang dari terlaksannya kegiatan kami diberikan arahan atau pembinaan.(wawancara pada Tanggal 30 januari 2017).

Kewenangan Camat dalam Pengarahan, pengawasan dan pembinaan yang sudah bisa dikatakan baik ini, senada dengan yang disampaikan oleh Lurah Tammalayang Alimuddin Tahir, bahwa,

“walaupun kami mengadakan laporan kegiatan setiap bulan ke kecamatan, tidak berarti Camat menerima laporan kami begitu saja. Beliau juga sering melakukan tinjauan langsung ke lokasi kegiatan pemberdayaan yang kami fasilitasi. Pembinaan pun tidak dilakukan sebatas pada musrenbang kecamatan, tetapi berlanjut hingga kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan mencapai hasil yang diinginkan.(wawancara pada tanggal 24 januari 2017).

Berangkat dari penjelasan kepala desa dan lurah dapat disimpulkan bahwa camat Bontonompo telah menjalankan kewenangannya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan secara langsung terhadap unit

kerja yang berada di kecamatan Bontonompo demi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

#### **4.3.3. Melakukan Evaluasi terhadap Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat**

Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Dalam pengertian lain, evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan, sampai sejauh mana tujuan program telah tercapai. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Wrightstone, dkk (1956) yang mengemukakan bahwa pengertian evaluasi adalah penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan ke arah tujuan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan.

Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan. Hal ini dimaksudkan sebagai tolak ukur dari pencapaian suatu program kerja kecamatan itu sendiri baik dari segi peningkatan dalam berbagai bidang di suatu daerah. Oleh karena itu, seorang memiliki tugas untuk mengevaluasi dadan dikerjakan di daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Kewenangan Camat untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan pada tingkat kecamatan, agar dapat mengetahui sampai sejauh mana tugas-tugas pemerintahan, pelayanan dan pembangunan terhadap masyarakat yang telah dilaksanakan.

Bagian ketiga dari tugas pokok dan fungsi camat dalam hal ini kewenangan atribut Camat mengkoordinasikan kegiatan masyarakat pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 adalah melakukan evaluasi. Dengan melakukan evaluasi diharapkan diketahuinya tingkat pencapaian hasil dari apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Di kecamatan Bontonompo, Camat dalam mengevaluasi kegiatan pembedayaan masyarakat dalam hal ini kegiatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah untuk masyarakat contohnya seperti dilaksanakannya suatu pembinaan dengan memberikan sosialisasi peningkatan produksi pertanian dapat dikatakan massif. Hal ini juga diungkapkan oleh Lurah Tamallayang Alimuddin Sijaya bahwa,

“dalam mengevaluasi suatu kegiatan pemerintah kelurahan turun langsung menilai setiap kegiatan yang sedang berlangsung. Camat dan aparat kecamatan juga turun langsung dalam mengevaluasi setiap kegiatan yang sedang berjalan contohnya dalam sosialisasi bidang pertanian camat langsung hadir untuk menilai bagaimana manfaat bagi masyarakat dengan adanya sosialisasi ini. (wawancara pada tanggal 24 januari tahun 2017).

Selanjutnya diperjelas lagi oleh Kepala Desa Barembeng Nurhadi Haris mengungkapkan bahwa,

“Evaluasi yang kami biasa laksanakan untuk melihat tingkat perbedaan suatu kegiatan disini dengan cara memonitoring untuk membandingkan apakah sangat bermanfaat atau tidak untuk masyarakat.(wawancara pada tanggal 24 januari tahun 2017).

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa kewenangan Camat tidak terlepas dari POAC (*planning, organizing, actuating dan controlling*), seorang camat memang seharusnya mengimplementasikan fungsi POAC ini seperti yang diungkapkan George terry yang mengatakan bahwa organisasi yang baik adalah organisasi yang selalu melakukan fungsi POAC.

#### **4.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kewenangan Atributif Camat dalam bidang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa**

Dalam penelitian ini kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang sifatnya menukung maupun menghambat proses. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kewenangan atributif Camat dalam bidang Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa sebagai berikut.

##### **4.4.1. Faktor Penghambat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa**

###### **1) Keterbatasan Anggaran**

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan untuk jangka waktu ( periode) tertentu di masa yang akan datang. Oleh karena rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran seringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga dapat diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan.

Penganggaran merupakan komitmen resmi manajemen yang terkait dengan harapan manajemen tentang pendapatan, biaya dan beragam transaksi keuangan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

Anggaran pula yang merupakan roda penggerak suatu kegiatan atau program yang akan dilaksanakan di kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Namun realitasnya anggaran merupakan salah satu faktor penghambat berjalannya suatu program kegiatan yang ada di Kecamatan Bontonompo. Hal ini di ungkapkan oleh Sekertaris Camat

"untuk faktor penghambat yang biasa terjadi disini itu, karena dana kegiatan yang masih terbatas, jadi biasa itu kita disini disesuaikan saja dana yang ada sehingga biasa tidak mencapai maksimal target yang ingin dihasilkan kegiatan tersebut.(wawancara pada tanggal 24 januari 2017).

Merujuk kepada penjelasan misi RPJMD Kecamatan Bontonompo dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat dan salah satu hambatannya bersumber dari keterbatasan anggaran, Pemerintah Daerah seharusnya merencanakan bentuk pembiayaan dan penganggaran terhadap setiap program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan baik. Hal ini seharusnya diusahakan untuk pembiayaan kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun penganggaran berikutnya dengan meningkatkan pembiayaan maka dapat bermuara pada hasil yang maksimal di setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sedang dijalankan di kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.

## **2) Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu indikator sumber daya manusia adalah tingkat pendidikan. Sumber daya manusia yang berkualitas dengan pendidikan yang tinggi akan mampu membantu dalam menyelesaikan tugas terutama dalam pelaksanaan kewenangan atributif camat. Kualitas sumber daya manusia juga ditentukan oleh masa kerja, karena dengan masa kerja yang lebih lama, seorang camat telah berpengalaman dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah pemerintahan.

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi. SDM yang dimaksudkan disini adalah camat itu sendiri beserta masyarakat yang ada pada kecamatan Bontonompo. SDM



merupakan masalah yang sudah tidak lazim lagi dalam pelaksanaan kewenangan atributif camat. Namun, masyarakat yang ada di kecamatan Bontonompo kurang berpartisipasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan, hal tersebut diungkapkan oleh camat Bontonompo M. Yasin Mallingkai, S.S, M.Si Bahwa,

“iya betul, salah satu kewenangan camat yaitu mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam hal ini mendorong partisipasi, memberikan pembinaan, pengawasan dan melakukan evaluasi itu tidak bisa berjalan apabila tidak di dukung oleh partisipasi masyarakat itu sendiri, di kecamatan bontonompo ini partisipasi masyarakat terhadap program kegiatan yang ada sangatlah kurang. Biasanya masyarakat disini masih kurang yang datang apabila ada sosialisasi ataupun pembinaan.(wawancara pada tanggal 24 januari 2016).

Jalannya kewenangan atributif camat dipengaruhi oleh camat dan masyarakat yang ada di kecamatan Bontonompo karena setiap program kegiatan yang dibuat harus terimplementasikan dari masyarakat itu sendiri tetapi masyarakat yang ada di kecamatan Bontonompo kurang berpartisipasi terhadap program telah di buat, sehingga faktor penghambat dalam pelaksanaan kewenangan atributif camat adalah SDM yang ada kurang merespon pembinaan serta program yang telah diberikan oleh camat Bontonompo pada akhirnya fungsi pengawasan dan evaluasi seorang camat juga kurang maksimal karena apa yang mau di awasi dan di evaluasi sedangkan program yang ada sebagian besar kurang mendapatkan respon dari masyarakat.

#### **4.4.2. Faktor Pendukung Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa**

##### **1) Kepemimpinan Camat**

Pada tingkatan kecamatan, kepemimpinan camat adalah hal yang mutlak diperlukan demi terciptanya masyarakat yang sejahtera, mandiri dan mempunyai hubungan emosional yang tinggi. Meski peran camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, camat tetap harus berusaha untuk mengkoordinasikan segala daya dan upaya dalam menjalankan semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kepemimpinan camat dalam perannya sebagai memberi motivasi.

Camat Bontonompo sebagai pemimpin di daerahnya dalam memberikan motivasi positif kepada para pegawainya dan terkhusus masyarakatnya sehingga mendorong masyarakat dalam hal peningkatan kesejahteraannya sendiri. peran camat sangat penting karena biasanya masyarakat lebih bergerak hatinya atau terdorong untuk meningkatkan pembangunan dan taraf hidupnya sendiri jika pemimpinnya sendiri yang langsung memberikan mereka motivasi untuk peningkatan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan beberapa informan, dalam hal ini masyarakat dan tokoh masyarakat Kecamatan Bontonompo bagaimana pengaruh camat dalam memberikan motivasi yang biasanya dilaksanakan dengan cara bekerjasama dengan dinas terkait untuk memberikan penyuluhan pada kelompok tani yang ada demi peningkatan hasil dan kualitas pertanian di Kecamatan Bontonompo yang merupakan

mata pencarian sebagian besar masyarakat Bontonompo, diperoleh gambaran bahwasannya camat dalam memberikan motivasi positif kepada para pegawainya ditangkap cukup baik. Camat dianggap sebagai pemimpin yang senang atau terbiasa berbaur dan memberi dorongan secara langsung kepada masyarakat. Hal ini diperoleh dari pengungkapan xxxxxxxxx selaku sekretaris Camat Kecamatan Bontonompo bahwa,

“pak camat dalam memberikan motivasi dengan cara memberikan dorongan, dan arahan secara langsung. Pak camat terkadang lebih banyak menggunakan waktunya untuk turun ke masyarakat untuk mengetahui persoalan atau memonitoring suatu kegiatan yang sedang berjalan dengan seperti itu masyarakat atau aparat kecamatan merasa dihargai dan tersentuh karena menerima motivasi langsung dari pemimpin.(wawancara pada tanggal 25 januari 2016)

Pendapat tersebut jika diselaraskan dengan pengungkapan salah satu staf di kantor Kecamatan Bontonompo Muhammad Rudy, S.Sos, M.Si, yang mengatakan bahwa,

“camat sangat mendukung berjalannya semua kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan di Kecamatan Bontonompo, pak camat biasa kasi kita aparat kecamatan motivasi dan pembinaan langsung disetiap ada rapat apabila ada kegiatan yang akan dilaksanakan begitu juga apabila kegiatan tersebut sudah terlaksana.(wawancara pada tanggal 25 januari 2017)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh tokoh masyarakat kecamatan Bontonompo M.Arsyad, SE bahwa,

“pak camat sangat merakyat, biasanya kalau ada kegiatan selalu hadir dan turut berpartisipasi contohnya apabila ada gotong royong yang diadakan di desa/kelurahan pak camat juga ikut turun sehingga

masyarakat juga bersemangat untuk ikut gotong royong.(wawancara pada tanggal 30 januari 2017).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa kepemimpinan seorang camat sangat mempengaruhi jalannya kewenangan atributif camat, kemampuan untuk mempengaruhi dan memberikan semangat kerja kepada bawahan dan masyarakatnya berguna sebagai pembinaan, pengawasan dan evaluasi dari setiap kegiatan yang ada, dalam hal kepemimpinan camat Bontonompo sebagai faktor pendukung karena camat selalu turun langsung ke lapangan untuk memberikan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

## **2) Kebijakan Pemerintah**

Kewenangan Atributif Camat di Bidang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat tidak terlepas dari peraturan sebagai pedoman dan legalitas program. Dengan adanya Undang Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Tugas dan Kewenangan Camat. Hal ini di dukung dengan dibuatnya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Gowa.

Hal ini dimaksudkan agar kewenangan atribut Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik dengan adanya legalitas hukum. Tidak hanya dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan pemberdayaan masyarakat yg dilaksanakan oleh Camat di masukkan ke dalam misi Kecamatan Bontonompo. Hal ini terlihat jelas

bahwa usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Bontonompo dalam memberdayakan masyarakat dinilai massif.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam hal ini merupakan pernyataan singkat dan tepat dari hasil penelitian dan pembahasan. Sedangkan saran dalam hal ini merupakan saran-saran dari penulis berdasarkan pengalaman dan pertimbangan penulis.

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kewenangan atributif camat diatur dalam Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan, tugas dan kewenangan camat dan peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tupoksi Camat. Pelaksanaan kewenangan atributif camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan kecamatan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh unit kerja, melakukan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja terkhusus kegiatan pemberdayaan

masyarakat. Ketiga indikator ini telah dilaksanakan oleh camat Bontonompo. Namun, dalam pelaksanaannya masih tergolong belum maksimal. Hal tersebut terlihat dengan cara camat Kecamatan Bontonompo memberikan dorongan, pengarahan, pembinaan, dan pengawasan dengan tindakan peninjauan langsung untuk setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di kecamatan Bontonompo agar program yang direncanakan mencapai hasil yang maksimal.

2. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan kewenangan atributif camat dalam bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa terbagi menjadi dua yakni faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi kepemimpinan camat, kebijakan pemerintah serta sarana dan prasarana. Sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia

## **5.2. Saran**

1. Camat dalam pelaksanaan kewenangan atributif camat dalam hal ini koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat harus lebih ditingkatkan. Mulai dari mendorong partisipasi masyarakat, melakukan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi harus lebih

diperhatikan agar dapat tercapai tujuan bersama yang lebih maksimal.

2. Masyarakat di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa sebaiknya mawas diri agar program yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan bisa terimpelentasikan dengan baik dan Camat Bontonompo sebaiknya meningkatkan hubungan komunikasi dengan pemerintah kabupaten Gowa agar sarana dan prasarana akan tetap terpenuhi dan anggaran setiap program bisa lebih mencukupi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Widjaja, Haw.2002. *Otonomi Daerah dan Daerah otonom*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Syakrani dan Syariani, 2009, *Implementasi Otonomi Daerah dalam Prespektif Good Governance*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wasistiono, Imail dan Fahrurozi, 2009, *Perkembangan Organisasi Kecamatan Dari Masa ke Masa*, Bandung: Fokus Media.
- Dharmawan, Arya Hadi., 2008, *Kelembagaan dan Tata Pemerintahan Kecamatan*, Bogor: Project Working Paper.
- Karim, A. Gaffar (Ed), 2006, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah diIndonesia*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Sarundajang, 2002, *Arus Balik Kekuasaan dari Pusat ke Daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta: PT. RinekaCipta.
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu kencana, 2013, *Ilmu Pemerintahan (edisi revisi kedua)*, Bandung: CV.Mandar Maju.
- Mustafa, Delli, 2014, *Birokrasi pemerintahan*, Bandung: Alfabeta.
- Billah, MM. 1996. "Good Governance dan Kontrol Sosial", dalam Prisma No. 8. Jakarta: LP3ES.
- Dharmawan, Arya Hadi., 2008, *Kelembagaan dan Tata Pemerintahan Kecamatan*. Bogor: Project Working Paper No. 07.
- Kinseng, R.A., 2008, *Kelembagaan dan Tata Pemerintahan Kecamatan*. Project Working Paper No. 03, Bogor.
- Labolo, Muhadam., 2008, *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Pertama Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka.

Mardikanto Totok, & Poerwoko Soebiato, 2015, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Kertapradja, E. Koswara, Peranan dan Kedudukan Camat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Makalah disampaikan sebagai bahan Diskusi pada Forum Democratic Reform Support Program (DRSP), 5 November 2007;

### **Undang Undang :**

Undang Undang Dasar 1945

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

### **Jurnal :**

Razikin, *Implementasi Pelimpahan Wewenang Walikota Kepada Camat Di Kantor Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang (Studi Terhadap Surat Keputusan Walikota Nomor 675 Tahun 2009)*, e-Jurnal, Fisip Universitas Maritim Raja Ali Ha